



ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

EDISI JANUARI-MARET 2022

GAUNG AMAN

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat

TANGGUH DI TENGAH KRISIS, PERKUAT SOLIDARITAS, PULIHKAN KEDAULATAN

Potret Masyarakat Adat
dalam Himpitan Krisis

Relevansi dan Urgensi
Gerakan Pulang Kampung





Susunan Redaksi

Penanggung Jawab
Sekretaris Jenderal AMAN
Rukka Sombolnggi

Pimpinan Umum
Deputi I Sekjen AMAN
Urusan Organisasi
Eustobio R. Renggi

Pemimpin Redaksi
Nurdiyansah Dalidjo

Sekretaris Redaksi
Titi Pangestu

Desain & Tata Letak
Taqi

Redaksi & Kontributor
Rainny Situmorang, Erasmus Cahyadi,
Mina Susena Setra, Muhammad
Arman, Monang Arifin Saleh, Annas
Radin Syarif, Abdi Akbar, Lesus
Rahmat, Jakob Siringoringo, Devi
Angraini, Alfa Gumilang, Chresly
Vikario, Giat Perwangsa, Apriadi
Gunawan, Firman Ikhwan, Seliani,
Yeryana, Khalifa Marasta, Rina
Agustine, Yuyun Kurniasih

Distribusi
Jeki Angkat & Awaluddin
(Direktorat OKK)

Alamat Redaksi

Rumah AMAN
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820

Telepon/Faks

(021) 829 7954/837 06282

Surat Elektronik

rumahaman@cbn.net.id

Facebook

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Twitter

@RumahAMAN

Instagram

@rumah.aman

YouTube

AMAN - Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara -

Podcast Radio Gaung AMAN

Situs : www.radio.aman.or.id

Sinar Spotify : Radio Gaung AMAN

Portal Berita AMAN.or.id

www.aman.or.id

Foto sampul merupakan dokumentasi AMAN yang menggambarkan para perempuan adat Montong Baan, Lombok Timur, NTB, sedang *begabah* (memanen padi) bersama-sama.

	Tanggung di Tengah Krisis, Perkuat Solidaritas, Pulihkan Kedaulatan	2
	Potret Masyarakat Adat dalam Himpitan Krisis	3
	Hutan Kami Tak Semata Nilai Uang	8
	AMAN Kecam Penembakan dalam Aksi Tolak Tambang di Sulteng	10
	Kriminalisasi atas Kades Kinipan Wilem Hengki	12
	Tema KMAN VI Ditetapkan pada RPB AMAN	13
	Perladangan Masyarakat Adat Dayak Maayan	14
	Mengenal Para Perempuan Adat Pejuang	18
	Relevansi dan Urgensi Gerakan Pulang Kampung	22
	Upaya Kedaulatan Pangan PHD PEREMPUAN AMAN Lou Bawe	26
	Masyarakat Adat Menolak Pasar Karbon	29
	Ruang Belajar untuk Anak Adat di Sigi, Sulteng	32
	Nyaba Dulur dalam Vaksinasi Masyarakat Adat Baduy	34
	Ketangguhan, Solidaritas, dan Kedaulatan Perempuan Adat	38
	Gerai Nusantara: Rumah bagi Produk Seni & Kerajinan Masyarakat Adat	45
	Transparansi Publik	48

Redaksi Majalah Gaung AMAN menerima sumbangan atau kontribusi tulisan berupa berita, artikel, feature, dan foto seputar Masyarakat Adat. Kami memprioritaskan kontribusi dari penulis warga adat (komunitas adat anggota AMAN). Silahkan menghubungi sekretaris redaksi kami pada infokom@aman.or.id atau kontak Rumah AMAN untuk mengetahui tema pada edisi selanjutnya maupun pengiriman tulisan dan/atau foto.



Tangguh di Tengah Krisis, Perkuat Solidaritas, Pulihkan Kedaulatan

Tanggal 17 Maret merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Masyarakat Adat Nusantara karena pada tanggal tersebut kita memperingati dan merayakan dua momentum penting yang menandai babak baru gerakan perjuangan Masyarakat Adat Nusantara, yaitu Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai wadah perjuangan Masyarakat Adat di seluruh Nusantara.

Sebagaimana Perayaan HKMAN dan Hari Ulang Tahun (HUT) AMAN pada 2021 lalu, kita mengangkat tema "Tangguh di Tengah Krisis," maka tahun ini kita ingin menegaskan kembali semangat ketangguhan dan menambahkan dua aspek yang amat penting dan kontekstual di tengah krisis ini, yaitu memperkuat solidaritas dan memulihkan kedaulatan Masyarakat Adat.

Ada tiga hal penting yang hendak kita dorong dari tema kali ini. Pertama, kita sedang mengobarkan semangat dalam menyambut Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) yang akan diselenggarakan pada 24-28 Oktober 2022 di Wilayah Adat Tabi, Jayapura, Papua. Kedua, kita menyadari situasi krisis luar biasa yang sedang kita hadapi. Krisis tersebut tidak hanya terbatas pada situasi pandemi Covid-19 yang belum usai, tetapi juga berbagai bencana dan krisis besar, mulai dari rentetan bencana alam, krisis iklim, hingga kemunduran demokrasi yang diwarnai dengan politik pecah belah yang menghancurkan keberagaman dan keakraban sesama bangsa. Krisis tersebut juga termasuk tingginya kasus perampasan wilayah adat yang disertai tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang secara rinci telah kita ulas dalam Catatan Akhir Tahun AMAN 2021 pada edisi ini. Ketiga, kita hendak menyampaikan harapan, yakni pemulihan, yang menjadi kata kunci atas persoalan Masyarakat Adat. Pemulihan terhadap kedaulatan merupakan hak yang melekat pada kita sebagai Masyarakat Adat dan sesungguhnya merupakan upaya pemulihan segala persoalan umat manusia dari berbagai krisis yang telah dan akan terjadi.

Kita telah melihat banyak contoh yang menunjukkan peran strategis Masyarakat Adat dalam mengatasi berbagai persoalan dunia: praktik ekonomi; sistem kedaulatan pangan; tata kelola wilayah adat yang lestari, adil, dan berkelanjutan; serta sistem pengetahuan lainnya yang dimiliki Masyarakat Adat.

Di tengah krisis yang sedang kita hadapi, berbagai upaya telah kita lakukan dan menjadi contoh baik yang perlu kita pertahankan dan perkuat dalam mengurus wilayah adat, antara lain Gerakan Pulang Kampung, Gerakan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan, kegiatan karantina wilayah adat yang mandiri dan bermartabat, solidaritas dengan sesama Masyarakat Adat dan kelompok masyarakat lainnya, penguatan hukum dan kelembagaan adat melalui musyawarah adat, serta sebagainya.

Sementara itu, kita juga menegaskan harapan untuk terus melawan dan menunjukkan bahwa Masyarakat Adat menolak tunduk dan punah. Kita ingin merawat kemanusiaan dan mempertahankan bumi dari kehancuran. Kita telah membuktikan bahwa dengan menjaga dan memelihara wilayah adat, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di wilayah adat kita saja, melainkan juga seluruh umat manusia di dunia dengan terus memproduksi pangan selama krisis. Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa saudara-saudara kita - kaum buruh, masyarakat miskin kota, tani, dan kelompok tertindas lainnya - juga sedang menghadapi penderitaan yang sama. Kita harus menggalang dan memperkuat solidaritas dan persatuan dengan ragam masyarakat lainnya. Oleh karena itu, penguatan solidaritas dan pemulihan kedaulatan menjadi syarat bagi ketangguhan Masyarakat Adat untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

Perayaan HKMAN dan HUT AMAN tahun ini menjadi momentum bagi Masyarakat Adat untuk merangkai simpul dalam menegaskan ketangguhan, memperkuat solidaritas, dan memulihkan kedaulatan untuk seluruh umat manusia. Perayaan ini merupakan perayaan untuk kita mempersatukan semua.

Selamat Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara!

Selamat HUT AMAN ke-23!

Berdaulat, mandiri, dan bermartabat!

Salam Nusantara,

Rukka Sombolinggi
Sekjen AMAN





Potret Masyarakat Adat dalam Himpitan Krisis

AMAN baru saja meluncurkan *Catatan Akhir Tahun (Catahu)* dengan judul "Tangguh di Tengah Krisis." Dengan membacanya, kita dapat menyaksikan betapa situasi Masyarakat Adat di Indonesia, masih diwarnai kesuraman dengan merujuk pada tren meningkatnya diskriminasi, perampasan wilayah adat, kriminalisasi, dan tindak kekerasan yang diikuti dengan penegakan hukum yang kian melemahkan Masyarakat Adat secara sistematis. Pada edisi ini, tim redaksi menghadirkan rangkuman dari laporan itu.

Perampasan Wilayah Adat

AMAN mencatat sedikitnya terdapat 13 kasus perampasan wilayah adat yang berdampak pada 103.717 warga Masyarakat Adat dan 251 ribu hektar wilayah adat. Ketiga belas kasus itu telah mencuat ke publik melalui berbagai pemberitaan media. Jumlah tersebut tidak menunjukkan jumlah

kasus sebenarnya di lapangan yang diprediksi berkali lipat lebih banyak. AMAN menilai bahwa rezim Presiden Joko Widodo telah gagal melaksanakan mandat konstitusi untuk mengakui, menghormati, dan melindungi Masyarakat Adat.

Pada Catahu, AMAN menyoroti sejumlah kasus yang menimpa berbagai Masyarakat Adat di Nusantara, terutama Masyarakat Adat Marafenfen di Kepulauan Aru, Maluku yang menggugat perampasan wilayah adat oleh TNI AL; konflik Masyarakat Adat dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara; kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak Agabag di Nunukan, Kalimantan Utara; pertambangan emas ilegal di lahan milik Masyarakat Adat di Desa Toruakat, Sulawesi Utara; pemaksaan pembangunan Waduk Lambo di Rendu, Nusa Tenggara Timur; pemberian Hak Guna Usaha (HGU) PT Sembalun Kesuma Emas yang melukai Masyarakat Adat Sembalun, Nusa Tenggara Barat; tambang pasir besi di Seluma, Bengkulu; penolakan izin HGU PT Sanjung Permai di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara; kriminalisasi Kades Kinipan, Kalimantan Tengah; konflik Masyarakat Adat Dayak Bekati Riuk di Bengkayang, Kalimantan Barat; proyek *food estate* di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua; dan perkara terkait dengan ibu kota negara (IKN).

13

KASUS

PERAMPASAN WILAYAH ADAT OLEH NEGARA & KORPORASI TAHUN 2021

sementara itu



hanya **56.903 Ha** (75 SK Hutan Adat) wilayah adat yang dikembalikan ke pangkuan Masyarakat Adat



sedangkan **240 Ribu Ha** Wilayah Adat dirampas Negara atas nama Perhutanan Sosial

mengakibatkan korban



103.717 Jiwa Masyarakat Adat

Bahkan dalam kasus di Toruakat, Bolaang Mongondow, seorang warga adat **ditembak mati** dalam bentrok antara warga adat dengan perusahaan tambang PT. Bulawan Daya Lestari (BDL).





Apa Kabar RUU Masyarakat Adat?

Sementara itu, *Catahu* juga mengutarakan kabar terkini terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang hingga hari ini, tidak juga disahkan. Di sisi lain, pejabat-pejabat publik semakin sering menggunakan baju adat sebagai kamufase atas wujud penghormatan terhadap Masyarakat Adat. Tantangan dari peraturan-perundang-undangan maupun kebijakan yang tidak berpihak pada Masyarakat Adat, semakin nyata di tengah-tengah situasi krisis ini.

Pemerintah juga memproduksi peraturan yang membuka peluang pada perampasan wilayah adat di kala RUU Masyarakat Adat tak kunjung dibahas.

RUU Masyarakat Adat berfungsi penting dalam menurunkan prinsip pengakuan konstitusi dan menjadi solusi acuan bagi peraturan sektoral terkait Masyarakat Adat. Saat ini, pemerintah telah memberi izin seluas 35 juta hektar hutan kepada perusahaan, sedangkan sejak Putusan MK 35/2012, wilayah adat yang dikembalikan ke Masyarakat Adat melalui skema hutan adat, hanya sekitar 69 ribu hektar, padahal jumlah yang telah dipetakan mencapai 11 juta hektar, di mana hampir 240 ribu hektar dirampas atas nama Perhutanan Sosial (PS) dan lebih dari dua juta hektar menjadi tumbal investasi.

DISKRIMINASI HUKUM

OLEH PEMERINTAH PADA MASYARAKAT ADAT



Wilayah Adat



12,4 Juta Ha

Wilayah Adat yang telah dipetakan oleh Masyarakat Adat



69 Ribu Ha

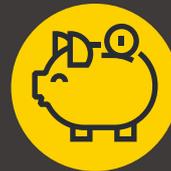
Hutan Adat yang dikembalikan negara via KLHK



20 Ribu Ha

Tanah ulayat yang diakui negara via KemenATR

Korporasi



35 Juta Ha

Kawasan hutan untuk perusahaan swasta



2,11 Juta Ha

Wilayah adat dirampas untuk kepentingan investasi tambang, HPH, HGU, HTI, dsb

Perhutanan Sosial



3,65 Juta Ha

Izin untuk Perhutanan Sosial



240 Ribu Ha

Wilayah Adat dirampas atas nama Perhutanan Sosial



Menyoal Perubahan Iklim dan Sikap atas Pasar Karbon

Melalui *Catahu*, AMAN turut menaruh perhatian pada masalah lingkungan. Hal itu secara spesifik menyoroti persoalan hilangnya hak Masyarakat Adat dalam kebijakan nasional tentang perubahan iklim, kebijakan tanah ulayat (reforma agraria) yang dikooptasi rezim neoliberal, pengakuan hutan adat yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum atas wilayah adat di pesisir dan pulau-pulau kecil, putusan Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas UU Cipta Kerja, dan Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan implementasi produk hukum daerah terkait Masyarakat Adat.

Sementara itu, di tingkat global, wacana tentang pasar karbon semakin menguat. AMAN menilai bahwa Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC COP 26 gagal memastikan *free, prior and informed consent* (FPIC) (hak yang dimiliki Masyarakat Adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap wilayah adat maupun kelangsungan hidup Masyarakat Adat) dan *grievance mechanism* (mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan) dalam Perjanjian Paris. Meskipun pada saat yang sama, koalisi yang terdiri dari berbagai negara dan donor internasional menyatakan ikrar untuk memastikan dukungan pendanaan bagi Masyarakat Adat, namun pasar karbon tetap menjadi ancaman nyata bagi wilayah adat di seluruh dunia. Perdagangan karbon sendiri didefinisikan sebagai kegiatan jual-beli kredit karbon (*carbon credit*) yang dianggap selayaknya "hak" bagi perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon dalam proses bisnisnya.

**STOK
KARBON
DI WILAYAH ADAT**



12,4 Juta Ha

Wilayah Adat yang telah dipetakan oleh Masyarakat Adat



6,946 Milyar Ton

Stok Karbon di Wilayah Adat

70,5% Luas Wilayah Adat adalah Hutan Adat

8,748 Juta Ha

Luas Hutan Adat dalam Wilayah Adat





Bencana iklim yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa kita tidak punya waktu lagi. Tapi, ironisnya, COP 26 di Glasgow, Skotlandia - yang diharapkan akan menghasilkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh negara - justru mengalami kemunduran dengan adanya pelemahan standar tentang penggunaan energi batu bara dari "penghentian bertahap" (*phase out*) yang disepakati dalam Perjanjian Paris, menjadi "penurunan bertahap" (*phase down*). Ini berarti bumi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membersihkan diri dari sumber energi paling kotor penyebab utama perubahan iklim.

Hal itu kelak menempatkan Masyarakat Adat sebagai penjaga 80 persen keanekaragaman hayati dunia yang sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dunia, semakin rentan. Pasar karbon yang diletakkan dalam mekanisme pasar, akan berpotensi tinggi menghilangkan hak Masyarakat Adat dan wilayah adatnya, termasuk akses terhadap hutan adat dan segala isinya. Absennya UU Masyarakat Adat dan lemahnya pengakuan terhadap hak Masyarakat Adat dalam berbagai UU dan kebijakan, termasuk dalam hal pengakuan atas wilayah adat, merupakan ancaman utama penerapan pasar karbon di wilayah adat, di mana negara didudukkan sebagai pihak yang berkuasa penuh atas karbon dan meniadakan hak Masyarakat Adat yang selama ini telah menjaga wilayah adat, termasuk hutan adat.

Maka, lagi-lagi, masalah mendasar masih tidak tersentuh. Kebijakan dan rencana kebijakan mengenai wilayah adat justru menunjukkan kecenderungan dalam memberi impunitas (kekebalan) terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, khususnya perampasan wilayah adat. Watak kebijakan tentang Masyarakat Adat dan wilayah adatnya saat ini, menunjukkan pembangkangan serius terhadap konstitusi.

Ketangguhan di Tengah Krisis

Dari seluruh kondisi krisis tersebut, Masyarakat Adat masih dihadapkan pada tantangan lain, yaitu Covid-19. AMAN melihat bahwa masuknya virus mematikan itu ke sejumlah wilayah adat, terkait langsung dengan operasi bisnis perusahaan di wilayah adat yang tetap memaksakan diri untuk berjalan di tengah pandemi. Meski begitu, Masyarakat Adat telah mengupayakan banyak hal untuk menegaskan resistensi dan daya lentingnya.

Bahkan, sejak sebelum pandemi terjadi, AMAN telah menggagas serangkaian kegiatan maupun program yang menguatkan gerakan kedaulatan pangan dan ekonomi berbasis Masyarakat Adat. Di berbagai penjuru Nusantara, gerakan tersebut telah banyak dipimpin oleh para pemuda adat dan perempuan adat. Dan ketika pandemi terjadi hingga saat ini, kegiatan-kegiatan berladang dan produksi pangan, bukan hanya tetap berjalan, tetapi juga semakin gencar. Ada banyak panen sekaligus pembelajaran yang dapat kita lihat dari hal itu untuk kemudian kita tak dapat lagi mengelak pada peran dan kedudukan strategis Masyarakat Adat sebagai solusi. Bahwa Masyarakat Adat adalah kunci atas jalan keluar dari beragam masalah, terutama pangan dan ekonomi. Dari sanalah, kita sesungguhnya telah melihat harapan.

Maka, berharap pada kebaikan negara tentu bukan tindakan cerdas. Tidak ada pilihan lain bagi kita selain memperkuat ketangguhan di tengah krisis, memperkuat solidaritas, dan memulihkan kedaulatan.

Publikasi Catatan Akhir Tahun: *Tangguh di Tengah Krisis* yang baru saja diluncurkan oleh AMAN, dapat diakses atau dibaca pada Portal Berita AMAN.or.id.



Keluarga besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengucapkan selamat kepada:

Michelin Sallata

Sebagai Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Periode 2022 – 2026



**#BanggaJadi
#PemudaAdat**





Hutan Kami Tak Semata Nilai Uang

Oleh Iqbal Damanik *



Iqbal Damanik
Sumber foto:
Dokumentasi pribadi.

Selayaknya gedung-gedung tinggi dan pusat ekonomi lain yang dikenal sebagai tempat orang-orang menggantungkan hidup. Seperti itu pula hutan bagi Masyarakat Adat, tempat menggantungkan hidup turun-temurun. Hutan bukanlah sekadar jajaran pohon tinggi yang rimbun, tapi menjadi kawasan mata pencarian, wadah berinteraksi sosial, dan ruang hidup.

Tapi, hutan sering sekali dianggap hanya situs kosong tak berpenghuni. Pengertian-pengertian ekonomi lebih memudahkan kita merelakan hutan hilang ketimbang gedung-gedung perkantoran dan pasar yang hancur, padahal di kedua tempat itu ada manusia yang sedang menggantungkan hidup. Sejak Revolusi Industri, gedung atau pabrik menentukan definisi ekonomi dengan menghasilkan industri dan perdagangan yang dipandang lebih bernilai ketimbang hutan atau jasa lingkungannya.

Kini, ekonomi yang dianggap hanya ditopang industri itu, membuat kepanikan pada keberlangsungan umat manusia. Pelan-pelan orang menyadari bagaimana proses rekayasa terhadap alam, memberikan kategorisasi benda baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan dalam siklus kehidupan alamiah, yaitu limbah, sampah, dan polusi. Produk itu terasing dari alam karena mencemari dan meracuni alam sekaligus kehidupan seluruh spesies.

Keterasingan itu terjadi antara manusia dan alam. Perkembangan sejarah manusia terjadi yang dipercepat oleh teknologi. Umat manusia mengubah posisinya dalam berinteraksi dengan alam, kini manusia lebih menguasai alam dan mengeksploitasinya untuk kemakmuran sebagian orang. Keserakahan mengancam umat manusia. Aktivitas ekonomi yang semestinya dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan manusia, ternyata lebih banyak memunculkan keinginan-keinginan baru yang tidak pernah terpuaskan, sehingga mengarah pada jalan buntu yang tidak semata-mata bersifat ekonomis, tetapi menimbulkan keterasingan manusia pada alam.

Kaum cerdas pandai kemudian berkumpul, berupaya memperlihatkan betapa bumi saat ini sudah sangat rapuh akibat ulah manusia. Berbagai bentuk perubahan, keterasingan, serta penghilangan pendukung alam dan bumi, perlahan melewati batas-batas kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Belakangan ditemukan bahwa bumi ini telah memanaskan dan jika melampaui pemanasan 1,5 derajat celsius, maka ancamannya bukan hanya iklim yang berubah, tapi juga kepunahan manusia.

Dampak dari itu, bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim dan temperatur bumi ini, sudah berulang kali terjadi di semua penjuru dunia, seperti kebakaran hutan, banjir, kekeringan, gelombang pasang, dan abrasi. Di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 2020, mencatat 2.952 bencana dan 99 persennya diakibatkan perubahan iklim. Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi kerugian ekonomi yang ditanggung Indonesia akan mencapai Rp544 triliun.

Solusi Palsu

Krisis iklim dan ancaman yang akan terjadi mendorong kesepakatan negara-negara untuk mengubah strategi ekonomi dan mendorong kebijakan yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan. Salah satu strategi paling utama, adalah tiap negara diminta berkontribusi untuk mengurangi karbon yang dihasilkan, termasuk Indonesia. Ini tentu tidak mudah, negara industri yang sudah sangat mengandalkan ekonomi karbon, mencoba untuk membantah dan menegosiasikan ulang. Industri negara-negara tersebut masih akan terus mempertahankan caranya menghasilkan uang yang mengotori bumi, seperti membakar batubara dan menggunduli hutan.

* Penulis adalah Pengkampanye Hutan, Greenpeace Indonesia



Untuk membangun insentif terhadap pengurangan karbon itu, salah satu solusi yang ditawarkan dan akan dijalankan, adalah perdagangan karbon. Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Kredit karbon adalah bentuk dari 'hak' bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Ini semua demi untuk membentuk nilai terhadap karbon yang dipandang sebagai persoalan kelangsungan umat manusia.

Asumsinya, dengan ini karbon memiliki nilai, sehingga rantai ekologi bumi untuk menjaga karbon pada level yang bisa ditoleransi manusia, menjadi beriringan dengan rantai ekonomi itu sendiri. Maka, kegiatan ekonomi yang sejak awal memang sesuai, dapat bersaing dengan bisnis yang destruktif dan menemukan tempatnya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, di sisi lain, perdagangan karbon memberikan hak pada perusahaan-perusahaan penghasil emisi untuk terus mengotori bumi dengan membeli kredit karbon, seperti membeli voucher pulsa yang bisa diisi ulang sesuai dengan kebutuhan.

Persoalannya justru ketika kita mempertanyakan, dari mana pulsa tersebut didapat? Pulsa tersebut diisi dari perusahaan yang dianggap bisa menjaga hutan, perusahaan "penjaga hutan" tersebut diberikan hak untuk menjual kredit dari perhitungan tertentu terhadap berapa banyak karbon yang bisa ditangkap oleh hutan tersebut dan seberapa mampu hutan itu bisa terjaga. Lembaga verifikasi akan menghitung kemampuan penyerapan karbon oleh lahan hutan pada proyek tertentu dan menerbitkan kredit karbon yang berbentuk sertifikat. Kredit karbon juga dapat berasal dari perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah ambang batas yang ditetapkan pada industrinya.

Setelah itu, perusahaan-perusahaan tersebut terus diperbolehkan berpolusi, kini mereka juga berupaya menguasai hutan tersisa yang selama ini dijaga masyarakat atas nama hijau. Skema ekonomi ini memungkinkan terbentuknya alur permintaan-penjualan di antara mereka sendiri, satu perusahaan di sebelah utara membakar dan menggunduli hutan, sementara di sisi selatan mereka mengklaim menjaga hutan.

Pengakuan Hak

Mengapa bisa begitu? Bukankah hutan selama ini diurus oleh Masyarakat Adat? Lalu, ada di mana Masyarakat Adat dalam skema ekonomi itu?

Komunitas yang selama ini terpinggirkan atas nama pembangunan dan ekonomi, kini wilayah hutan yang telah dijaga secara turun-temurun justru semakin terancam direbut atas nama proyek hijau. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya, alih-alih skema ini merupakan kelanjutan rencana perampasan ruang hidup atas nama keberlanjutan. Proyek-proyek hijau tersebut tidak berbeda dengan penguasaan dan hak pada perusahaan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Hutan-hutan tersebut dikavling-kavling menjadi konsesi tanpa mengindahkan Masyarakat Adat yang menggantungkan hidup pada hutan tersebut, dan akan dipaksa keluar karena hutan tersebut dimiliki oleh perusahaan yang memiliki izin proyek hijau tadi.

Masyarakat adat memiliki sejarah panjang dan telah terbukti menyelamatkan hutan-hutan yang digempur oleh industri-industri berbasis lahan. Memang, tanpa adanya nilai uang yang diberikan pada hutan tersebut, Masyarakat Adat akan terus menjaga hutan karena itulah roh, ruang hidup, dan upaya memastikan kehidupan terus berlanjut. Namun, imbal balik antara hutan dan masyarakat sebagai "skema ekonomi" yang ada di masyarakat, ternyata tidak mampu dilindungi, dijaga, atau bahkan dimafhumi oleh negaranya sendiri.

Tidak hanya tidak dimengerti, dalam proses itu, bahkan Masyarakat Adat berulang kali dipaksa tunduk pada aturan-aturan negara yang hanya dipahami oleh pengusaha dan pemerintah. Hingga kemudian, hak, imbal balik dengan hutan dan bahkan keberadaannya pun dianggap nihil dalam seluruh skema publik yang disediakan pemerintah. Padahal, jika negara mampu memberikan hak pada perusahaan tersebut untuk meng-hak-i hutan kita, mengapa tidak pada Masyarakat Adat.

Memahami keberadaan aktor dan nilai dari keberlanjutan inilah yang hilang dalam solusi tersebut.

Dengan pengakuan hak atas hutan terhadap Masyarakat Adat, tidak hanya akan berkontribusi pada upaya mencegah terjadinya perubahan iklim di Indonesia, tapi juga di global. Masa depan bumi bergantung pada hutan yang dijaga oleh pemiliknya, Masyarakat Adat.



AMAN Kecam Penembakan dalam Aksi Tolak Tambang di Sulteng

Oleh Apriadi Gunawan



Aksi tolak tambang di Palu, Sulteng.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

AMAN mengecam keras tindakan penembakan yang menimbulkan tewasnya korban dalam aksi protes menolak tambang emas PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Lagi dan lagi, kita menyaksikan kekerasan di negeri yang katanya merdeka," ungkap Sekjen AMAN Rukka Sombolnggi menanggapi peristiwa tersebut. "Tahun lalu, terjadi penembakan Masyarakat Adat Toruat di Sulawesi Utara. Kali ini, di Sulteng. Penanganan berlebihan yang melibatkan aparat keamanan atas protes damai seperti ini, tidak bisa diterima akal sehat."

Ia berpesan bahwa polisi harus segera menarik seluruh pasukan yang saat ini berada di lokasi.

"Gubernur juga harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Cabut IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Trio Kencana," tegas Rukka. "Penembak harus diusut dan dihukum seberat-beratnya. Pemerintah dan aparat harus memastikan keamanan seluruh masyarakat yang ada di lokasi."

Massa dari sejumlah organisasi Masyarakat Adat dan pendukungnya itu turun ke jalan menggelar aksi konvoi dari Bundaran Tabulako menuju Polda dan Kantor Gubernur Sulteng pada Senin (14/2/2022). Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Rekognisi Masyarakat Adat (KARAMA) Sulteng, mendesak Kapolda dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan Erfaldi, warga berumur 21 tahun dari Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Erfaldi dilaporkan tewas setelah terkena tembakan peluru di perutnya saat aksi menuntut pencabutan izin tambang PT Trio Kencana pada Sabtu (12/2/2022).

Ketua AMAN Sulteng Asran Daeng Patompo selaku Koordinator KARAMA Sulteng, menyatakan bahwa kasus tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh polisi hingga menewaskan nyawa seorang peserta aksi, sudah tidak bisa ditolerir. Asran mendesak agar pelaku penembakan segera ditangkap dan diadili.



“Kita minta kasus penembakan ini diusut tuntas,” tuntutan Asran Daeng Patompo jelang persiapan aksi konvoi ke Polda Sulteng pada Senin (14/2/2022).

“Kapolri harus segera memproses secara hukum aparat kepolisian yang terduga (adalah) pelaku penembakan korban.”

Ia mengatakan bahwa pihaknya kecewa dengan sikap polisi yang bertindak represif dalam menangani aksi penolakan tambang tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan massa, merupakan hal yang wajar karena menyangkut wilayah adat yang hendak dijadikan lokasi tambang. Seharusnya, ia bilang, polisi tidak perlu mengedepankan kekerasan dalam menanggapi aksi massa, apalagi sampai mengorbankan nyawa seorang peserta aksi.

“Satu orang telah merengang nyawa dan ada kurang lebih 60 orang warga ditangkap paksa. Apakah seperti ini potret polisi kita menangani aksi massa?” tanya Asran sembari berucap syukur seluruh warga yang ditangkap telah dibebaskan pada Minggu malam (13/2/2022).

Ia menerangkan bahwa warga menolak keberadaan tambang emas PT Trio Kencana karena luas konsesi tambangnya mencakup hingga ke lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan milik warga.

Menanggapi tewasnya warga dalam aksi tersebut, Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufhariadi mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut insiden yang menimbulkan korban jiwa itu.

“Sangat disayangkan insiden ini,” ungkap Rudy. “Namun, kami bekerja profesional. Siapa pun yang bersalah, akan kami hukum sesuai aturan dan perundang-undangan berlaku.”



Aksi warga memblokir jalan trans sulawesi sebagai bentuk protes menolak rencana tambang emas PT Trio Kencana
 Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Kriminalisasi atas Kades Kinipan Wilem Hengki

Oleh Apriadi Gunawan

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi mendesak kepolisian untuk segera membebaskan Kepala Desa (Kades) Kinipan Wilem Hengki dari tahanan karena diduga menjadi korban kriminalisasi oleh sekelompok orang. Menurutnya, tindakan polisi tersebut *offside* (di luar posisi) sebab sarat dengan kepentingan.

Rukka menjelaskan bahwa Kades Kinipan itu merupakan salah satu tokoh Masyarakat Adat Kinipan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang selalu berjuang mempertahankan wilayah adatnya dari ekspansi perkebunan sawit PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Kegigihannya dalam mempertahankan wilayah adat, diduga menjadi penghalang atas kepentingan kelompok tertentu.

"Begini nasib Kades Kinipan yang konsisten mempertahankan wilayah adat (dan) yang menolak sawit," kata Rukka pada Sabtu (15/01/2022). Ia menjelaskan bahwa apa yang dialami Wilem, merupakan bentuk kriminalisasi yang tak lain adalah pembungkaman atas perlawanan Masyarakat Adat. Rukka juga menyinggung tentang fenomena *elite capture* (penangkap elit) terkait dengan bentuk korupsi yang membiaskan sumber daya publik demi kepentingan tertentu. "Akhirnya, mereka berhasil menangkap kades yang baik. (Itu) hanya salah satu strategi lanjutan ketika (upaya) *elite capture*, sogok, dan pecah belah tidak berhasil."

Sinung Karto, Staf Advokasi Pengurus Besar AMAN, menerangkan bahwa kasus yang menjerat Wilem berawal dari Surat Perintah Bupati Lamandau Hendra Lesmana yang bersifat rahasia kepada Inspektorat Kabupaten Lamandau tanggal 31 Januari 2020. Dalam surat tersebut, Hendra memerintahkan agar dilaksanakan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan belanja modal dan belanja barang dan jasa sesuai ketentuan pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kinipan untuk tahun anggaran pada 2017, 2018, dan 2019. Bupati pun meminta agar hasil itu dilaporkan dalam waktu segera mungkin.

"Bila mencermati surat perintah itu, patut kita menduga (bahwa) Kades Kinipan sudah lama dibidik," kata Sinung. Menurutnya, banyak temuan dari inspektorat yang sengaja mengorek-ngorek kesalahan Wilem sebagai kades yang teguh pendiriannya dalam mempertahankan wilayah adat dari ekspansi sawit

Sejak 2012, Masyarakat Adat Kinipan gigih menolak wilayah adat untuk dijadikan perkebunan sawit. Jauh sebelum Willem Hengki menjabat di sana, para kepala desa terdahulu bersama Masyarakat Adat telah bersikap seperti itu. Sementara itu, segelintir warga yang kemudian menerima kehadiran perkebunan sawit, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, di mana ada dari warga setempat yang turut bekerja sebagai buruh untuk perusahaan perkebunan itu.

Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, menuturkan bahwa penahanan Kades Kinipan atas dugaan korupsi, merupakan hal yang keliru. Pasalnya, jalan desa yang menjadi objek kasus tersebut masih dinikmati oleh masyarakat sampai saat ini. Ia menyatakan bahwa jalan tersebut selesai dikerjakan tahun 2017 saat Wilem belum menjabat sebagai kades. Dan ketika diangkat, Wilem hanya membayar hutang proyek jalan usaha tani tersebut pada 2019.

"Kades Wilem Hengki tidak bersalah," tegas Buhing. "Penahanannya merupakan bentuk kriminalisasi."



Kades Kinipan Wilem Hengki.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Tema KMAN VI Ditetapkan pada RPB AMAN

Oleh Nurdiyansah Dalidjo



Penyelenggaraan RPB AMAN XXVIII di Jayapura, Papua.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

AMAN menyelenggarakan Rapat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-28 (RPB AMAN XXVIII) pada 21-22 November 2021. RPB AMAN yang dipimpin oleh Abdon Nababan sebagai Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) tersebut, menjadi istimewa karena berlokasi di Jayapura, Papua.

Setelah melalui musyawarah, akhirnya ditetapkan bahwa tema Kongres Masyarakat Adat Nusantara keenam (KMAN VI) adalah "Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis."

Abdon Nababan mengutarakan makna di balik rumusan tema tersebut. "Melihat 'pemulihan' itu yang pertama," katanya dalam menegaskan kata kunci terkait dengan persoalan Masyarakat Adat di Indonesia. "Pemulihan itu bisa dari Masyarakat Adat sendiri atau pemerintah. Dan yang dipulihkan adalah kedaulatannya. Kedaulatan itu menjadi pengikat Masyarakat Adat. Kalau kita berdaulat, maka melekatlah hak-hak itu. Itu menjadi syarat ada bangsa Indonesia untuk merawat atau menjaga keberagaman. Itu juga menjadi syarat untuk tangguh menghadapi krisis apa pun. Jadi, penekanannya pada memulihkan."

Pada kesempatan yang sama, AMAN menerima tiga anggota baru, yaitu Komunitas Masyarakat Adat Limbuang dan Malino dari PD AMAN Massenrempulu di PW AMAN Sulawesi Selatan serta Komunitas Masyarakat Adat Beo Tere dari PD AMAN Flores Bagian Barat di PW AMAN Nusa Bunga. Selain itu, terdapat perubahan berupa penggabungan sejumlah komunitas Masyarakat Adat berdasarkan hasil verifikasi anggota. Sehingga, saat ini AMAN beranggotakan 2.423 komunitas Masyarakat Adat.

Pada akhir RPB tersebut, Sekjen Rukka Sombolinggi memberikan pidato penutupan dengan mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan yang berjalan lancar dan optimis pada pelaksanaan KMAN VI.

"Terima kasih dan semoga leluhur, alam semesta, Sang Pencipta Tuhan YME melindungi hasil kerja keras kita."



Perladangan Masyarakat Adat Dayak Maayan

Oleh Yeryana *



Proses menabur benih untuk perladangan.
Sumber foto: Mareta Karunia.

Kami dari Komunitas Masyarakat Adat Haringen - bagian dari Masyarakat Adat Dayak Maayan - di Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah (Kalteng), tidak menolak kemajuan dan pembangunan. Kami adalah warga yang sedang berupaya berdaulat secara pangan lewat pengelolaan wilayah adat sesuai kearifan leluhur yang telah teruji oleh waktu dan terasah oleh pengalaman sehari-hari.

Kami menciptakan kedaulatan pangan lewat praktik perladangan tradisional dengan membakar secara terbatas di lahan kecil. Hal tersebut kami lakukan bukan karena kami tertutup pada teknologi pertanian modern, melainkan demi menjaga warisan leluhur. Berladang dengan cara membakar bukan tindakan egois dalam merusak hutan, tetapi pengelolaan lahan yang penuh ketelitian dan tanggung jawab.

Tahapan Perladangan Dayak Maayan

Kami tidak merusak hutan dalam berladang. Kami mengolah tanah di hutan yang tidak produktif agar menjadi kebun. Sebelum lahan di hutan itu dibuka dan diolah, kami permissi pada entitas penjaga hutan dengan melakukan Nyuwuk Jumpun. Ritual tersebut merupakan permohonan izin, di mana kami menyiapkan sajen berupa beras, logam, telur ayam kampung, dan daun rirung. Sajian kami letakkan di bawah pohon pada pagi hari dan dibacakan doa. Tiga hari kemudian, kami baru boleh menjenguk sajen itu dan kami akan menemukan ciri-ciri apakah permohonan kami diterima atau tidak. Saat ciri-ciri penerimaan itu tampak, kami akan membuka lahan esoknya.

* Penulis adalah perempuan adat dari Masyarakat Adat Dayak Maayan dan PEREMPUAN AMAN PHD Bartim.



Ritual Nyuwuk Jumpun.
Sumber foto: Mareta Karunia.

Pertama, kami akan membersihkan lahan, antara lain menebas (*tamaruh*) dan menebang (*neweng*) pohon-pohon di lahan itu. Prosesnya tidak sembarangan sebab kami perlu memperhatikan arah angin. Biasanya, proses *neweng* dimulai dengan mengambil arah dari matahari terbit (timur) ke matahari tenggelam (barat). Setelahnya, kami pilih satu pohon paling besar dan arahkan rebahannya ke pohon-pohon lain, lalu tebang pohon tersebut hingga tumbang menimpa pohon-pohon lain, sehingga membuatnya tumbang bersamaan seperti kartu domino.

Sedangkan proses *tamaruh*, dilakukan dari satu titik mulai - yang disebut bata piharungan - dan biasa dimanfaatkan sebagai tempat mengasah alat kerja sekaligus tempat istirahat. Dari bata piharungan, kemudian akan berpindah tempat dan dilanjutkan pada hari berikutnya setiap hari. Pada hari pertama sampai ketiga, *tamaruh* harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh putus hari atau berjeda agar nanti pertumbuhan padinya baik dan tak tersendat.

Selesai menebang, dilanjutkan dengan *hanradah*, yaitu proses memotong ranting-ranting pohon agar cepat mengering. Lalu, dilanjutkan dengan *iranrang*, yaitu penumpukan potongan kayu dan ranting serta daun-daun di beberapa titik. Pembersihan tiap pinggir lahan di bagian batas luar itu, adalah teknik sekat bakar agar saat dilakukan proses *nutung* (membakar), api tidak meluas. *Nutung* dilakukan tiga hari pasca-*iranrang* selesai, yakni saat potongan kayu, ranting, dan semak yang ditumpuk, kering dan siap dibakar.

Masa bakar dilakukan pada Agustus-September dan awal November. Pembakaran lahan ladang pada Oktober, sangat dihindari karena - berdasarkan pengalaman leluhur - bulan itu punya arus angin yang rendah dan berisiko membuat api mudah tersebar luas. Proses *nutung* tidak pernah dilakukan sendiri oleh pemilik ladang, melainkan gotong-royong. Secara umum, berladang selalu kami lakukan bersama agar bibit tumbuh baik di baris ladang yang bertetangga. Itu kami sebut *babantai*.

Selesai proses *nutung*, selanjutnya *ipandruk*. Itu adalah proses menumpuk sisa kayu yang belum habis dimakan api. Biasanya, dua hari pasca-*nutung*, baru *ipandruk*.

Dalam membakar, selain memiliki sekat bakar, kami juga bergotong-royong mengantisipasi kebakaran dengan mempertimbangkan pemilihan lokasi ladang yang tidak boleh jauh dari sumber air. Dalam proses membakar, ada mantra warisan leluhur yang disebut *Tampajah Api*. Jadi, saat bakaran yang dijaga mulai menampakkan risiko akan meluas, mantra dibacakan agar api padam.

Sambil melakukan *ipandruk*, dilakukan itatak, yaitu pembersihan tunggul-tunggul pohon yang ditebang. Kemudian, tunggul-tunggul dan tumpukan *pandrukan* dibakar agar lebih bersih. Proses pembukaan dan pembersihan ladang, lebih banyak dilakukan oleh pria.

Rata-rata pada minggu kedua November, masuklah masa *muau* (*menugal*) menurut perhitungan Dayak Maayan. Periode itu kami juluki dengan *wulan matueh* (saat bulan bersinar penuh di langit), di mana kami percaya padi-padi diberi roh agar tumbuh subur.



Benih yang dipersiapkan oleh perempuan adat.
Sumber foto: Mareta Karunia.

Peran dan Kontribusi Perempuan Adat

Pasca-*muau*, peran perempuan adat lebih banyak dalam perawatan ladang, seperti *ijajap* (membersihkan rumput di sela-sela padi). Setelah masa itu, para perempuan adat akan menanam aneka sayur, buah, dan obat.

Keseharian perempuan adat tergantung pada ladang yang selayaknya "*minimarket*" sekaligus dapur. Saat panen, Masyarakat Adat Dayak Maayan akan memanfaatkan hasilnya untuk kebutuhan pangan komunitas adat. Kami juga tidak lupa berucap syukur kepada roh leluhur. Kami tidak boleh memasak beras kami jika semua padi belum naik ke rumah. Saat semua sudah naik ke pondok, barulah beras dimasak dengan lauk yang nikmat. Tapi, sebelum kami menikmatinya, ada ritual *Nahampe*. Beras baru dan lauk yang dimasak akan disajikan sebagai simbol syukur kepada roh leluhur atas berkat dan penyertaan mereka, sehingga panen kami baik sekaligus doa agar panen tahun depan sebaik tahun ini. Setelah ritual dilangsungkan, aktivitas makan bersama dilakukan dengan keluarga, tetangga, dan kerabat.



Makanan ritual dari Masyarakat Adat Dayak Maayan
Sumber foto: Mareta Karunia.



Setelah panen, lahan akan kami bersihkan dan kami tanami tanaman produktif, seperti pohon karet dan buah, antara lain durian, cempedak, duku atau langsung, dan lainnya.

Ladang adalah bagian dari area kelola kami di wilayah adat. Itu merupakan investasi bagi generasi selanjutnya dengan prinsip berkelanjutan. Meski keuntungannya tidak sebanyak atau secepat perkebunan sawit dan pertambangan batu bara, namun cara investasi kami itu terbukti bersahabat dengan alam dan berkelanjutan. Perlahan dan kecil, namun pasti bagi generasi selanjutnya.

Dengan melarang kami membakar lahan untuk berladang, maka itu secara langsung mencegah kami berdaulat atas pangan di wilayah adat kami. Kami akan kehilangan kearifan lokal, ritual, pengobatan tradisional, dan seni anyaman yang merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan alat kerja perempuan adat yang ramah lingkungan ketika berladang.

Kesejahteraan bagi Masyarakat Adat, bukan tentang berapa banyak uang yang bisa kami miliki untuk membeli barang-barang modern yang habis pakai dan mencemari lingkungan, namun saat kami dapat memenuhi sandang dan pangan kami dari tanah dan hutan di wilayah adat.



Mengenal Para Perempuan Adat Pejuang

Oleh Tim Redaksi dan PEREMPUAN AMAN

Pada buku berjudul *Perjalanan PEREMPUAN AMAN: Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999-2017* yang diterbitkan PEREMPUAN AMAN (2017), kisah para perempuan adat pejuang diulas dengan cukup mendalam. Para perempuan adat tersebut bergulat di kampung masing-masing untuk mempertahankan wilayah adat dan hak perempuan adat.

Pada edisi ini, untuk merayakan buah dari perjuangan para perempuan adat, kami menghadirkan profil lima tokoh perempuan adat yang telah memberikan kontribusi besar dan signifikan bagi gerakan Masyarakat Adat di Nusantara. Para perempuan adat itu seringkali berdiri di garis depan ketika kaum lelaki dan tetua telah dipenjara atau diperdaya. Situasi yang dialami oleh para perempuan adat tersebut merupakan pembelajaran penting. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi pernah mengutarakan, "Ada dua kelompok yang biasanya akan hadir di ujung perjuangan, yaitu anak muda dan perempuan. Tapi, di dalam perjalanan, umumnya adalah perempuan yang maju ke medan perang dan berjuang tanpa kekerasan. Banyak yang berhasil, tapi ini tidak banyak diceritakan dan tidak banyak mewarnai pengambilan keputusan. Padahal, perempuan adat adalah benteng perjuangan."



Potret Mama Yosepha.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Sosok Yosepha Alomang

Adalah perempuan adat yang berasal dari Masyarakat Adat Amungme, Papua. Perempuan berbadan kecil, berkulit hitam, dan berambut ikal itu akrab dipanggil Mama Yosepha. Ia berdiri tegak dalam membela hak asasi manusia (HAM) dan kedaulatan atas wilayah hidup Suku Agimuga di Amungme yang dirampas oleh PT Freeport. Mama Yosepha pernah mengorganisir aksi dalam melakukan pemotongan pipa perusahaan dan pendudukan bandara di Timika selama tiga hari.

Perjuangannya tidak pernah mudah. Johanna, anak sulung Mama Yosepha, meninggal karena kelaparan ketika ia bersembunyi dari kejaran militer di hutan. Ia juga pernah direndam di dalam kolam kotoran manusia selama seminggu karena dianggap menolong tokoh Organisasi Papua Merdeka. Gelora kian berkobar ketika Mama Yosepha hadir dan memberikan kesaksian pada sarasehan perempuan adat yang bertajuk "Menggugat Posisi Perempuan Adat atas Masyarakat Adat dan Negara" dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I di Jakarta, 1999. Kesaksiannya menorehkan semangat di hati perempuan adat lainnya yang hadir dari berbagai wilayah dan kampung-kampung di Indonesia kala itu. Ia menjadi bara untuk perlawanan atas penindasan dan kekerasan yang dialami perempuan adat.



Sebagai kelanjutan dari perjuangannya, ia mengajukan gugatan perdata kepada PT Freeport pada 1995. Dana ganti rugi dari perusahaan tersebut lalu digunakannya untuk membangun Kompleks Yosepha Alomang yang berupa monumen pelanggaran HAM, klinik, panti asuhan, dan gedung pertemuan. Perempuan adat penerima Anugerah Lingkungan Goldman itu, kemudian juga mendapat penghargaan Yap Thiam Hein tahun 1999 dan mendirikan YAHAMAK (Yayasan Hak Asasi Manusia Anti-Kekerasan) tahun 2001. (Devi Anggraini)

Sosok Den Upa Rombelayuk

Pada suatu percakapan di sela-sela KMAN V di Sumatera Utara, Den Upa Rombelayuk - perempuan adat dari Toraja, Sulawesi Selatan - bilang bahwa perjuangan perempuan adat itu penuh dengan berbagai lapisan. "Perjuangan pertama, adalah menggugat diri sendiri dulu," ucap perempuan adt yang telah tutup usia di umur 74 tahun pada pertengahan 2019 lalu. Kala itu, ia tengah menjelaskan bagaimana perempuan adat harus berhadapan dengan persoalan ketidakpercayaan diri akibat ketertindasan dan keterbatasan akses. Setelah diri sendiri, menurutnya, ada lapisan-lapisan lain yang menanti. "(Setelah menggugat diri sendiri, kemudian) perempuan adat harus berjuang untuk gugat keluarga, masyarakat, dan organisasi Masyarakat Adat, di mana kita berada agar mereka merelakan tempat untuk kita sebagai perempuan adat." Setelahnya, lapisan yang lebih besar akan dihadapi lagi, salah satunya adalah negara.

Bersama suaminya, perempuan adat yang akrab disapa Mamak Den itu terlibat dalam gerakan perjuangan Masyarakat Adat dengan proses pendirian JAPHAMA (Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat) tahun 1993 di Madandan dan kelahiran AMAN tahun 1999. Namun, sebelum itu, ia sudah bergerak untuk membangkitkan kembali pengetahuan dan tatanan adat terkait dengan pengelolaan wilayah adat dan sumber daya di dalamnya yang terancam oleh hutan negara, perkebunan kopi, dan industri pariwisata di wilayah adatnya. Den Upa juga merekonstruksi *Kombongan* (proses pengambilan keputusan) dan *Tongkonan* (rumah adat) yang berdampak pada keterlibatan perempuan dalam musyawarah adat.



Potret Den Upa Rombelayuk.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Selain turut membidani AMAN, pada KMAN I di Jakarta, Mamak Den pula berperan sangat besar untuk ikut ambil bagian sebagai salah satu fasilitator. Pada awal berdirinya AMAN itu, ia sempat menjabat sebagai Dewan AMAN sekaligus Koordinator Dewan AMAN untuk Region Indonesia Wilayah Timur pada 1999-2003 dan Anggota DAMANNAS pada 2003-2012. Kala itu, sosoknya telah dikenal sebagai perempuan adat yang memiliki keterampilan komunikasi yang amat baik. Ia seolah menjadi obor yang ikut menerangi jalan bagi para aktivis Masyarakat Adat untuk menemukan jalan perjuangan. Hingga akhir hayatnya, penerima *fellowship* dari Ashoka itu, masih menjabat sebagai Ketua Dewan Wilayah AMAN Sulsel. (Nurdiyansah Dalidjo)



Sosok Nai Sinta

Sugapa adalah kampung adat yang menorehkan sejarah penting perlawanan terhadap PT Inti Indorayon Utama (kini menjadi PT Toba Pulp Lestari) di Porsea, Sumatera Utara. Perjuangan itu dimulai oleh 10 perempuan adat (*inang*) yang menolak kehadiran perusahaan tersebut di tanah adat warisan Raja Sidomdom Baringbing di Parsibarungan, Sugapa. Dalih pembayaran *pago-pago* (semacam ganti rugi) yang diajukan perusahaan dan pemerintah untuk mengklaim tanah adat itu, ditolak para *inang* karena adanya pemalsuan tanda tangan dan keikutsertaan sejumlah nama masyarakat yang bukan pemilik tanah adat tersebut.

Nai Sinta boru Sibarani, seorang *inang* berperawakan kecil, bersanggul, dan berkain khas Batak, memimpin pencabutan tanaman eukaliptus yang ditanam perusahaan. Sosoknya tidak kenal takut dalam mempertahankan wilayah adat meski dihadang berbagai tindakan represif. Bersama perempuan adat lain, Nai Sinta dipidanakan perusahaan dan ditangkap. Pengadilan memutuskan hukuman enam bulan yang disahut dengan kemarahan: "Tanah adat kami yang diambil, (tapi) kenapa kami yang ditahan?" Meski pengajuan banding sampai kasasi ke Mahkamah Agung RI, berujung pada penolakan, namun 10 *inang* itu tidak ditahan karena alasan kemanusiaan.

Namun, perjuangan tidak berhenti. Nai Sinta nekat ke Jakarta bersama perempuan adat lainnya dengan membawa serta anak-anak mereka untuk menemui Menteri Dalam Negeri. Selama empat hari, mereka duduk di lorong kantor hingga akhirnya diterima bertemu menteri dan menerima surat dari kementerian yang meminta bupati dan perusahaan agar menyerahkan tanah adat di Sugapa.



Potret Nai Sinta boru Sibarani.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Nai Sinta hadir dalam KMAN I tahun 1999 lalu. Pada sarasehan perempuan adat, meski telah berusia lanjut, ia dengan semangat menceritakan perjuangannya tanpa meneteskan air mata di hadapan para perempuan adat. Itu menjadi momen yang kian menumbuhkan semangat dan keinginan perempuan adat untuk berbuat lebih banyak dan berdiri tegak. (Devi Anggraini)

Sosok Rukimini Toheke

Rukmini Toheke telah mulai berjuang mereklaim ruang bagi perempuan adat sejak sejak 1994. Ia berasal dari Kampung Ngata Toro di Sulawesi Tengah. Di sana, ia menggali kembali peran penting perempuan adat yang telah direduksi oleh negara, yakni *Tina Ngata* (Ibu Kampung) yang memainkan fungsi penting dalam peradilan adat di Ngata Toro. Selain itu, Rukmini turut menggali lagi makna dan konteks *Pobolia Ada* (perempuan sebagai penyimpan adat), *Pangalai Baha* (perempuan sebagai bagian dari keputusan perkara), dan *Potavari Bisa* (perempuan sebagai pendamai). Dari situ, tak ada lagi dalih yang mengatakan bahwa perempuan adat di Ngata Toro, tak punya hak atas tanah atau wilayah kelola perempuan.



Akhir tahun '90-an, Rukmini berada di garda depan perjuangan melawan taman nasional yang merebut wilayah adatnya. Ia bersama para perempuan adat lainnya, terlibat negosiasi untuk merebut kembali wilayah adat. Tahun 2000, perlawanan itu membuahkan hasil. Di kampungnya, ia juga sukses mengorganisir perempuan adat untuk menyelenggarakan sebuah kongres pertama yang membahas isu gender dan perempuan adat. Lewat upaya itu, peran penting perempuan adat dalam berbagai aspek kehidupan di kampungnya, mulai terkuak dan bangkit, termasuk tradisi kain kulit kayu yang menegaskan kedudukan perempuan adat, terutama dalam ritual adat.

Perjuangan Rukmini tak berhenti dan berlanjut ke pertarungan politik elektoral. Ia pernah maju sebagai caleg DPR RI untuk Dapil Sulawesi Tengah. Menurutnya, berbagai perubahan dapat dilakukan perempuan adat melalui kebijakan, mulai dari level kampung hingga negara. (Nurdiyansah Dalidjo)



Potret Rukmini Toheke.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Potret Aleta Ba'un.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Sosok Aleta Ba'un

Aleta Kornelia Ba'un - akrab disapa Mama Aleta - adalah perempuan adat dari Molo, Nusa Tenggara Timur. Bersama ratusan perempuan adat, ia berjuang dan berhasil mengusir perusahaan tambang dari wilayah adatnya melalui aksi damai dengan menenun secara serempak di perbukitan batu.

"Perempuan juga pemilik tanah yang diakui dalam budaya Molo, dan (protes) ini membangkitkan kembali perempuan untuk aktif menyuarakan keinginan untuk melindungi tanah kami," ucapnya pada suatu wawancara. Setelah sukses mengorganisir masyarakat adat melawan tambang, Mama Aleta terus berjuang lewat jalur politik. Ia juga dikenal sebagai politisi perempuan adat yang disegani. Pada pencalonan dalam pemilu sebelumnya, ia menang melawan kandidat yang menggunakan politik uang. Modal utamanya dalam kampanye politik, adalah siri pinang yang pula menjadi simbol menggalang solidaritas Masyarakat Adat.

Nama Mama Aleta juga harum di mancanegara. Sampai kini, ia masih terlibat dalam upaya pengembangan seni dan tradisi tenun di Molo lewat yayasan yang didirikannya. Tahun 2013 lalu, ia dianugerahi Goldman Environmental Prize dan dari hadiah pada penghargaan itu, Mama Aleta Fund dilahirkan untuk mendukung program pemberdayaan perempuan di kampung. (Nurdiyansah Dalidjo)



Relevansi dan Urgensi Gerakan Pulang Kampung

Oleh Yuyun Kurniasih *

Adegan Hong Du-Sik tengah berbincang dengan seorang lansia dalam suatu potongan adegan pada Hometown Cha Cha Cha.

Sumber foto: Netflix.



Hometown Cha Cha Cha - sebuah drama Korea (drakor) yang rilis pada 28 Agustus 2021 - memberikan saya kegembiraan sekaligus inspirasi. Tokoh Hong Du-Sik yang diperankan oleh Kim Seon Ho, adalah pemuda dengan karier cemerlang di kota, namun ia memutuskan untuk tinggal dan bekerja di kawasan perdesaan di pesisir. Sosok dan kisah pada drakor tersebut, kemudian mendesak suatu perenungan serupa pada apa yang sedang didorong oleh kawan-kawan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), yaitu Gerakan Pulang Kampung.

Pada drakor itu, Hong Du-Sik seketika berubah menjadi pemuda yang tampak jauh lebih bahagia dan bermanfaat ketika berada di kampung. Ia dapat melampiaskan dan mengasah keterampilannya dalam memasak, berkebun, bertukang, membuat kopi, merawat lansia, dan lain-lain di kampung yang memiliki serangkaian keterbatasan akses. Itu mengingatkan saya pada berbagai kisah sukses dari pemuda adat yang memutuskan kembali ke wilayah adatnya.

Memulai Gerakan Pulang Kampung

Gerakan Pulang Kampung merupakan gerakan yang diinisiasi oleh BPAN dan telah berlangsung selama sepuluh tahun. Gerakan tersebut muncul dari kegelisahan banyak pemuda adat di Indonesia - baik yang lelaki, perempuan, maupun bergender non-biner - terhadap asumsi buruk pada anak muda yang tinggal di kampung, di mana kita dihadapkan pada kondisi umum bahwa sekolah-sekolah formal "terbaik" hanyalah ada di kota-kota. Jika kita ingin belajar dan menjadi yang "terbaik" pun mendesak kita untuk pergi meninggalkan kampung. Sementara itu, perampasan atas wilayah adat yang kita tinggalkan, terus berlangsung.

* Penulis - akrab disapa Ayun - adalah perempuan queer yang menemukan jati dirinya sebagai pemuda adat. Ia kini aktif di BPAN dan membawa identitas "pelangi" sebagai bagian dalam keberagaman Masyarakat Adat di Indonesia.



Jhontoni Tarihoran di kebun jagung yang dikelolanya.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Lewat Gerakan Pulang Kampung, kami melihat ada secercah jalan keluar untuk masalah yang tengah kita hadapi di bumi hari ini. Tetapi, untuk memulainya, kita harus mampu melawan stigma: bahwa di kampung, kita bisa hidup dan kita bangga sebagai pemuda adat.

Pada awal tahun 2020, kita telah membuktikan kalau kampung adalah tempat yang aman dan nyaman saat Covid-19 menyerang. Kehadiran virus mematikan itu telah meluluhlantakkan kota, di mana banyak sekolah, kantor, dan toko yang ditutup. Para buruh di-PHK (pemberhentian hubungan kerja) dan banyak dari mereka hidup tanpa penghasilan hingga berbulan-bulan. Kota tak lagi menjadi ruang yang menjamin kepastian untuk bertahan hidup. Makan saja susah, apalagi bekerja. Itulah momen penting Gerakan Pulang Kampung yang kami lihat sebagai alternatif solusi untuk menjawab kegelisahan para pemuda adat yang tinggal di kota. Pulang dan bangun kampung, menjadi sesuatu yang urgen dan pilihan terbaik.

Apa yang dilakukan oleh Hong Du-Sik, lalu benar-benar juga dilakukan oleh pemuda adat serentak. Begitu pula dengan kawan-kawan anggota BPAN yang ikut berpartisipasi di dalam Gerakan Pulang Kampung. Kita dapat melihat Jhontoni Tarihoran, Ketua Umum BPAN pada periode 2015-2018 lalu, yang pulang ke kampungnya untuk bertani. Saat ini, aktivitasnya segudang. Di sana, selain berorganisasi dan aktif di dalam gerakan perjuangan Masyarakat Adat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, tepatnya Kampung Janji, ia sibuk sehari-hari mengurus bermacam tanaman organik di bekas lahan kebun sawit, seperti sawi, jahe, jagung, dan sebagainya. Ia juga terlibat dalam menggerakkan warga kampung untuk membentuk kelompok tani dan masuk di dalam proses pengambilan keputusan di desa sebagai Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di Komunitas Masyarakat Adat Bayan di Desa Karang Bajo di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada juga kawan Harianto (Anto) yang selepas merantau di Jakarta, kini mengurus kampungnya. Aksi kembali ke kampung yang dilakukan Anto, tentu patut kita apresiasi. Pemuda adat yang serba bisa itu melihat kampung sebagai peluang untuk mengajak pemuda-pemuda adat lain membangun kampung.

Pada Oktober 2021 lalu, saya berkunjung ke kampung Anto. Saya kagum dengan keterampilan yang dimilikinya. Ia aktif dalam organisasi dan kepengurusan desa dengan mengombinasikan keterampilan yang dimilikinya dan potensi lokal. Selain menjadi petani, Anto memiliki usaha penyewaan mobil, berjualan es campur, dan mengelola toko foto kopi. Saat itu, saya bahkan diajaknya keliling kampung dan disuguhkan tutur tentang seluk-beluk kampungnya, mulai dari cerita soal ritual, pakaian, hingga kesenian berupa tarian adat. Anto juga bisa menari. Tentunya, ia punya kemampuan komunikasi yang baik.



Potret kampung dari Masyarakat Adat Bayan, di mana Anto berasal dan kini tinggal.

Sumber foto: Dokumentasi BPAN.



Situasi Pemuda Adat Ancaman dan Tantangan

Dalam *Hometown Cha Cha Cha*, saya pun diperlihatkan potret lain dari kampung dengan kesenjangan populasi antara generasi muda dan tua. Kampung didominasi warga yang berusia anak dan lansia. Situasi serupa juga dialami oleh kampung-kampung di Indonesia. Tingginya stigma atas kampung dan tekanan atas standar pendidikan pada jenjang sekolah formal, - di mana masih ada kesenjangan antara fasilitas pendidikan di kota dan desa - mengakibatkan banyak pemuda adat terpaksa meninggalkan kampung. Harapan untuk bisa hidup layak, seolah hanya mampu diwujudkan dengan belajar, bekerja, dan tinggal menetap di kota.

Lalu, bagaimana kampung dapat bertahan dari gempuran atau ancaman dari luar? Kami meresponnya dengan secara konsisten membangun Gerakan Pulang Kampung.

Keterlibatan dan partisipasi pemuda adat di kampung, menjadi fokus utama. Pemuda adat adalah bagian penting di dalam suatu komunitas Masyarakat Masyarakat maupun kampung yang harus dilibatkan dalam berbagai proses politik. Saya sendiri menyaksikan bagaimana Hong Du-Sik ikut dalam rapat-rapat di desa, bahkan menempati jabatan sebagai wakil di dusun dan tak pernah absen dalam rapat pengambilan keputusan di desa. Keberaniannya layak kita acungi jempol, misalnya saat sampah desa dibuang sembarangan, Hong Du-Sik dan kepala dusunnya mengangkat sampah ke dalam kantor desa sebagai bentuk advokasi.

Hal semacam itu juga dapat kita temui pada cerita Jhontoni ketika hendak berjuang untuk pencalonan dirinya menjadi Anggota BPD. Ia harus menempuh perjalanan dua jam lebih untuk sampai ke kota kabupaten dan memastikan syarat-syarat pencalonan dirinya dapat memenuhi syarat. Kepala desanya sempat menyatakan pada Jhon bahwa salah satu syarat menjadi calon Anggota BPD, adalah menikah dan memiliki syarat lain yang hanya bisa diurus pada level kabupaten. Mendengar pernyataan tersebut, Jhon keberatan dan mengatakan kalau dalam Undang-Undang Desa, syarat-syarat tertentu yang disebutkan itu ternyata tidak ada.



Hambatan yang dialami Jhon, lazim didapatkan oleh para pemuda adat lain di berbagai kampung. Kehadiran pemuda adat dalam rapat-rapat desa, terkadang masih diremehkan dan dianggap seolah kami ini tidak memiliki sikap politik dan tak memiliki pendirian saat memutuskan suatu keputusan. Padahal, desa membutuhkan pemuda adat yang aktif dan layak diberi kepercayaan untuk bisa bersama-sama membangun kampung. Perubahan-perubahan berada di tangan pemuda adat.

BPAN sendiri pernah mengangkat topik itu secara mendalam melalui buku *Pemudi Adat Tersisih dari Tanah Adat* yang terbit pada 2020. Buku itu mengangkat realitas pemuda adat melalui tiga studi kasus terhadap Masyarakat Adat di Minahasa, Sulawesi Utara; Dayak Simpakng, Kalimantan Barat; dan Sikka, Nusa Tenggara Timur. Persoalan-persoalan yang dihadapi pemuda adat di tiga kawasan itu beragam, mulai dari perihal partisipasi pemuda adat, ketersinggungan dengan konflik akibat kehadiran perusahaan, pemanfaatan teknologi komunikasi, hingga pembangunan infrastruktur berskala besar di wilayah adat. Buku itu memaparkan sekelumit tantangan berlapis yang dihadapi oleh kami. Dan itu semua berhubungan dengan kerentanan Masyarakat Adat dan potensi pada hilangnya wilayah adat sebagai ruang hidup.

Belajar dari Pemuda Adat yang Mengurus Wilayah Adat

Kisah-kisah di atas adalah bukti bahwa pemuda adat tidak sedang baik-baik saja. Ancaman terus digulirkan dari mana pun. Rumah, kampung, dan negara dapat menjelma ruang-ruang yang tidak ramah dan terus menggusur jati diri pemuda adat dari wilayah adatnya. Kembali ke kampung menjadi peluang bagi para pemuda adat.

Reduksi atas pemikiran-pemikiran terhadap pemuda adat yang tinggal di kampung, tumbuh dan menjadi dikotomi yang tak terpisahkan antara kota dan desa. Pada sejumlah kasus, pemuda adat kerap dilihat sebagai orang yang tak memiliki keterampilan. Hal itu diperjelas pada drakor yang tonton, tepatnya pada suatu adegan yang memperlihatkan ada orang di desa yang tak menyangka kalau Hong Du-Sik adalah lulusan dari kampus bergengsi di Korea Selatan. Jadi, stigma pemuda adat itu kerap dianggap bodoh atau tak memiliki kemampuan, baik itu intelektual maupun keterampilan, juga sering kami hadapi.

Tapi, kita tidak sepatutnya lekas berkecil hati. Kita punya beragam cerita menarik yang membuat kita bahagia. Kisah dari Jhontoni dan Anto pun tak melulu berkulat pada pergulatan pemuda adat di kampung, melainkan pula pembelajaran yang berbuah manis. Dua kawan kita itu bisa berdaya di desa, bukan hanya untuk diri dan keluarganya, namun pula komunitasnya.

Saya dapat cerita lain dari Timotius, kawan kita dari Masyarakat Adat Dayak Seberuang Ansok di Sintang, Kalimantan Barat. Ia tak cuma bekerja mengelola kebun dan ladang, tapi juga menggerakkan pemuda adat lain di kampungnya. Sehingga, secara kolektif, kelompok pemuda adat di sana dapat terlibat aktif dalam memelihara, menjaga, merawat, dan melindungi wilayah adat. Bagi Timotius, tanggung jawab menjaga alam adalah tugas bersama kita sebagai pemuda adat. Cara-cara yang ditawarkan oleh Timotius, sangat menarik. Ia memulainya dengan mencoba mengenali bakat-bakat yang dimiliki oleh kalangan pemuda adat sendiri, seperti menari, menulis dan berbicara di depan publik. Secara bersama-sama, para pemuda adat di sana pun akhirnya membangun sekolah adat. Para pemuda adat di Sintang juga punya kegiatan menarik, yakni kemah ke hutan adat. Aktivitas itu pun menawarkan metode yang membuat kawan-kawannya semakin mencintai wilayah adatnya, sehingga para pemuda adat dapat lebih mendekatkan diri dengan alam sebagai guru dan warisan dari leluhur yang harus dijaga.

Maka, Gerakan Pulang Kampung tidak hanya hendak memberikan hasil yang solutif bagi masalah kita saat ini, tapi juga menawarkan proses dan pendekatan alternatif yang khas dari kami sebagai pemuda adat.



Upaya Kedaulatan Pangan PHD PEREMPUAN AMAN Lou Bawe

Oleh Seliani *



Unit usaha penanaman sayur kacang panjang.
Sumber foto: Dokumentasi PHD PEREMPUAN AMAN Lou Bawe.

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) adalah organisasi sayap AMAN sekaligus organisasi perempuan adat yang memiliki 67 wilayah pengorganisasian dengan jumlah anggota mencapai 2.855 perempuan adat di Indonesia. Sementara itu, Pengurus Harian Daerah (PHD) PEREMPUAN AMAN Lou Bawe merupakan salah satu wilayah pengorganisasian yang dibentuk pada 2017 (awalnya bernama PHD Samarinda). Kami di sini bekerja bersama 111 anggota perempuan adat di 13 kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda di Kalimantan Timur (Kaltim).

Melalui tulisan ini, kami hendak berbagi kisah tentang upaya-upaya kedaulatan pangan dengan para perempuan adat di level kampung atau komunitas Masyarakat Adat.

Respon Cepat Pandemi dan Unit Usaha

Pada 2020 lalu, kami sempat khawatir akan terjadinya krisis pangan di wilayah adat. Selain menghadapi situasi menantang akibat pandemi, kami juga memiliki persoalan lain terkait kondisi alam, seperti kemarau berkepanjangan, banjir, dan gagal panen karena serangan hama. Berbagai tantangan tersebut berdampak pada kehidupan banyak perempuan adat di kampung terkait dengan peran penting kami di dalam keluarga, khususnya dalam mendukung pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

PHD PEREMPUAN AMAN Lou Bawe kemudian membuat Program Respon Cepat Pandemi Covid-19 dan Program Unit Usaha di Komunitas. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah pembagian paket sembako dan perlengkapan kesehatan (termasuk masker). Hal itu juga dilanjutkan dengan pembentukan 22 unit usaha di 10 kampung dan satu kota, yaitu Kampung Dingin, Kampung Lambing, Kampung Payang, Kampung Damai Seberang, Kampung Muara Bomboy, Kampung Muara Tae, Kampung Mancong, Kampung Sembuan, Kampung Linggang Mapan, Kampung Asa, dan Kota Samarinda.



Unit usaha yang kami bentuk bertujuan untuk membantu kawan-kawan perempuan adat mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari selama Covid-19 melanda. Kami berkumpul dan membentuk kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang untuk membuat unit usaha bersama. Jenis usaha bersama itu bervariasi, mulai dari kegiatan menanam sayur, berternak ayam pedaging, berternak ikan lele, dan menjahit masker. Pengembangan jenis unit usaha tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk menghasilkan produk yang berpotensi memberikan keuntungan secara bersama dalam jangka waktu sekitar tiga bulan.



Unit usaha penanaman sayur kacang panjang.
Sumber foto: Dokumentasi PHD PEREMPUAN AMAN Lou Bawe.



Unit usaha pembuatan masker.
Sumber foto: Dokumentasi PHD PEREMPUAN AMAN Lou Bawe.

Setelah tiga bulan berjalan, kami melakukan refleksi bersama terhadap unit usaha yang dijalankan. Pada kesempatan itu, kami dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dari cerita kawan-kawan perempuan adat di kampung, terdapat beragam tantangan yang kami hadapi. Namun, pada akhirnya, semua dapat berjalan dan berproses bersama hingga panen tiba.

* Penulis merupakan anggota PHD PEREMPUAN AMAN Lou Bawe



Di saat yang sama, kami juga telah membangun unit usaha ternak babi yang kami namakan Program Seribu Babi untuk mendukung kedaulatan pangan perempuan adat, khususnya di Kampung Lambing. Ada kisah menarik dari proses kami untuk itu.

Kami menghadapi banyak tantangan, namun kami tetap semangat dan antusias untuk terus melanjutkan kegiatan unit usaha bersama tersebut. Di Kampung Lambing, para perempuan adat bersepakat untuk menggabungkan tiga unit usaha untuk Program Seribu Babi. Ibu Kresensia Laura Lisaria, seorang perempuan adat dari Kampung Lambing, mengatakan bahwa program tersebut mendapatkan dukungan dana dari AMAN melalui Program Kedaulatan Pangan.

Program Seribu Babi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para perempuan adat. Sistem kerjanya berkelompok, yaitu berternak babi secara bersama. Bagi anggota yang ternak babinya sudah beranak, maka ia wajib memberikan seekor anak babi kepada anggota yang belum mendapatkan bibit babi. Ternak babi yang sudah siap panen pun akan bisa dijual atau dikonsumsi sendiri.

Melalui berbagai kegiatan unit usaha maupun Program Kedaulatan Pangan itu, kami menjadi lebih berdaya dalam menghadapi ancaman krisis pangan di tengah pandemi. Selain kebutuhan pangan dapat tercukupi, kami juga mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru. Ada yang berhasil dalam menjalankan unit usaha, namun ada juga yang mengaku gagal. Kami saling menguatkan dan memberikan dukungan moril satu sama lain.

Maka, mari, kawan-kawan perempuan adat se-Nusantara, kita upayakan kedaulatan pangan di komunitas Masyarakat Adat kita masing-masing. Kita kelola wilayah adat kita agar tidak dikelola oleh orang lain!

Salam keadilan dan setara!



Unit usaha ternak babi di Lambing.

Sumber foto: Dokumentasi PHD PEREMPUAN AMAN Lou Bawe.



Masyarakat Adat Menolak Pasar Karbon

Oleh Nurdiyansah Dalidjo



Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Masyarakat Adat & masyarakat sipil pada COP 26.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Perubahan iklim (*climate change*) menjadi tantangan global yang turut mempengaruhi situasi ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan dunia di abad ini. Secara sederhana, perubahan iklim diartikan dengan perubahan terhadap iklim, suhu, maupun curah hujan secara signifikan karena kenaikan temperatur bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Fenomena pemanasan global telah memberikan berbagai dampak, meliputi cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, kekeringan, longsor, banjir, dan bencana lain. Dampak tersebut juga sudah dirasakan di berbagai wilayah adat di Nusantara. Dan, di tengah diskusi tentang pentingnya peran hutan sebagai penyeimbang suhu bumi, muncul gagasan pasar karbon.

Topik itu mengemuka pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP 26 di Glasgow, Skotlandia yang berlangsung tanggal 1-2 November 2021 lalu. Pada pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan sekaligus negara yang potensial untuk menyumbang karbon.

Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon didefinisikan sebagai kegiatan jual-beli kredit karbon (*carbon credit*) yang dianggap selayaknya "hak" bagi perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon dalam proses bisnisnya.

Pemerintah hendak menetapkan batasan, mengatur mekanisme, hingga menerbitkan sertifikat atas kredit karbon pada pasar karbon dengan asumsi bahwa pemerintah (bersama negara-negara lain) akan dapat mengontrol jumlah emisi karbon. Namun, persoalan tidak sesederhana itu. Jargon yang beredar terkait dengan anggapan bahwa menjaga hutan bisa mendapatkan bayaran uang, telah menempatkan hutan seolah komoditi. Sementara bagi Masyarakat Adat, hutan sebagai bagian dari wilayah adat, adalah ruang hidup.

Iqbal Damanik dari Greenpeace mengkritik hal tersebut sebab melegitimasi mereka yang merusak lingkungan di tempat tertentu untuk tetap punya "hak" merusak di tempat yang berbeda. "Mereka akan bisa bilang, tak apa merusak di sini karena sudah memelihara di sana," kata Iqbal. Menurutnya, para elit keliru dalam menginterpretasikan Pasal 6 Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement*) yang dijadikan landasan perdagangan karbon.

Pemerintah Indonesia pun mengklaim bahwa hutan di Indonesia dapat menyerap 5,5 giga ton karbon dioksida dengan luas 36,5 juta hektar atau sekitar 10 persen dari kredit karbon dunia senilai Rp1.400-1.600 triliun.



Mina Setra (baju berwarna merah) tengah berbincang bersama Pangeran Charles pada COP 26.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Dampak terhadap Masyarakat Adat

Perdagangan karbon dapat menimbulkan peluang munculnya konsesi baru terhadap kawasan hutan Indonesia, di mana yang tersisa saat ini berada sebagian besar di wilayah adat. Konsesi yang ditaruh pada perusahaan atas dalih hendak melindungi hutan, akhirnya akan memperhadapkan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan pada berbagai masalah. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK 35) telah menekankan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.

Sekjen AMAN Rukka Sombolnggi mengutarakan bahwa persoalan krisis iklim sudah tidak bisa dihindari dan Masyarakat Adat tidak bisa memilih untuk tidak jadi bagian dari itu. "Sikap kita tak boleh ada sesuatu dari luar wilayah adat tanpa pengakuan hak Masyarakat Adat dan tanpa FPIC," tegas Rukka.

Free, prior, and informed consent (FPIC) atau persetujuan bebas tanpa paksaan, memberikan peluang Masyarakat Adat atas partisipasi dan demokratisasi dalam pengambilan keputusan.

"Tak boleh ada pembangunan di wilayah adat sebelum Masyarakat Adat tahu betul apa yang terjadi, apa dampaknya, apa manfaatnya, dan bagaimana kita terlibat di dalam itu. Keputusan diambil melalui musyawarah adat," ungkap Rukka. Ia mengingatkan kembali bahwa 20 persen permukaan bumi, dikuasai oleh Masyarakat Adat, di mana hutan-hutan terbaik masih dapat ditemukan karena kontribusi Masyarakat Adat. "Di sanalah rumah dari 80 persen keanekaragaman hayati yang tersisa. Masyarakat Adat yang memastikan bumi tidak hancur.

Sebelum topik pasar karbon mengemuka, terdapat mekanisme dalam mengatasi soal perubahan iklim dengan menghentikan laju pengrusakan hutan melalui REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Mengenai itu, Abdon Nababan, Sekjen AMAN pada periode terdahulu, kembali mengutarakan tentang posisi Masyarakat Adat.



"REDD+ secara substansi sudah dikerjakan Masyarakat Adat selama ratusan tahun," ungkap Abdon. "Bahkan, di banyak tempat, ada yang zero (nol) atau minus emisi. Kalau REDD+ diharapkan akan terus berjalan di wilayah adat, maka yang diperlukan hanyalah pengakuan dan perlindungan yang efektif terhadap keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya." Abdon menjelaskan bahwa REDD+ pernah dipakai untuk mengangkat derajat Masyarakat Adat sebagai pengelola hutan terbaik, sehingga untuk mengharapkan Masyarakat Adat menjadi solusi terhadap perubahan iklim, pengakuan dan perlindungan atas Masyarakat Adat dan wilayah adatnya, tinggal dilanjutkan dengan mendukung Masyarakat Adat mengelola ekosistem di wilayah adatnya.

Saat itu, AMAN memposisikan keterlibatan dengan syarat: tidak ada REDD+ tanpa pengakuan hak Masyarakat Adat (*no rights, no REDD+*). Abdon mengatakan bahwa karbon di wilayah adat, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak Masyarakat Adat atas hutan, sementara hutan adalah bagian tak terpisahkan atas hak atas tanah. Maka, hak atas karbon tak boleh dipisahkan dari hak atas tanah dan hak atas hutan.

Deputi Sekjen AMAN Urusan Politik Erasmus Cahyadi menyimpulkan alasan terhadap penolakan mekanisme pasar karbon, di mana ide dasar atas itu dibangun di atas ketidakadilan. Hal tersebut bukan hanya mengacu pada proses yang rumit, melainkan pertimbangan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan komitmen Masyarakat Adat untuk menjaga hutan, tak pernah dimasukkan ke dalam urusan perdagangan karbon.

"Pandangan itu mengonfirmasi keseluruhan hal yang sudah dipaparkan: ada pemaafan terhadap industri yang merusak lingkungan," katanya. "Perdagangan karbon justru akan menjerat Masyarakat Adat pada ruang yang sulit, misalnya bagaimana prosedur perdagangan itu masih belum melibatkan Masyarakat Adat sebagai subjek yang dihormati dalam hukum."



Masyarakat Adat dari Seluruh Amerika datang melakukan aksi saat COP26 untuk mengabarkan penderitaan mereka.
Sumber Foto : www.thenational.scot.

Ruang Belajar untuk Anak Adat di Sigi, Sulteng

Oleh Firman Ikhwan*



Kegiatan belajar anak-anak adat di Komunitas Masyarakat Adat Da'a di Sulawesi Tengah.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Topo Da'a - juga dikenal sebagai Orang Da'a - merujuk pada Komunitas Masyarakat Adat Da'a yang tinggal di sekitar hutan di Bulu Kondo, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dalam bahasa setempat, kondo berarti gunung. Menurut sejarah asal-usul, Masyarakat Adat Da'a berasal dari Gunung Gawalise. Perpindahan itu disebabkan karena Bulu Kondo menyimpan tanah yang subur, di mana Masyarakat Adat Da'a kemudian dapat bercocok tanam dan mengumpulkan rotan dari hutan yang dijaga dan dikelola secara lestari. Sampai sekarang, Orang Da'a masih dilekatkan sebagai peladang dan pengumpul rotan.

* Penulis adalah staff PB AMAN

Tahun 2018, gempa, tsunami, dan likuifaksi menimpa sebagian Sulteng. Bencana tersebut mengakibatkan terjadinya longsor di Bulu Kondo dan mendesak Masyarakat Adat Da'a untuk mengungsi ke lokasi tanah hibah dari warga di Desa Tuva, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Akibat bencana itu, banyak Orang Da'a kehilangan rumah dan mata pencaharian.

Potret kehidupan Masyarakat Adat Da'a di pengungsian, masih jauh dari layak. Ada banyak keprihatinan, terutama pada situasi anak-anak adat di sana. Selain masih berjuang atas pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, para warga juga kian khawatir pada aspek pendidikan.



Mangge Kose, seorang ketua kelompok di pengungsian, memiliki harapan terhadap anak-anak Da'a agar bisa belajar membaca dan menulis selayaknya anak-anak lain di usia sekolah. Ia dan para orangtua lain menginginkan anak-anak adat bisa pula terus mengenyam pendidikan. Tetapi, dengan segala keterbatasan yang ada, banyak warga yang pasrah dan belum mampu berbuat banyak. Persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Da'a di Desa Tuva itu tentu adalah potret kecil dari banyaknya persoalan serupa yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia yang masih menghadapi berbagai situasi menantang dalam mengakses pendidikan sebagai hak.

Melalui inisiatif dan kerja keras kelompok pemuda adat di Sulteng, kami turut mendorong terbentuknya rumah belajar. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, saat ini rumah belajar tersebut masih mendiami bangunan sederhana semipermanen yang terbuat dari kayu, bambu, dan terpal seadanya.

Donasi dan dukungan kawan-kawan yang bergabung di dalam DerMA (Donasi Gerakan Masyarakat Adat) sedikit demi sedikit, akan digunakan untuk membeli papan tulis, buku, dan alat tulis untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak adat di Komunitas Masyarakat Adat Da'a. Kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi generasi penerus Masyarakat Adat karena kebahagiaan dan keberlangsungan atas kualitas hidup anak-anak adat untuk bisa belajar, adalah nilai yang berharga sekaligus masa depan bagi keberlanjutan wilayah adat dan upaya dalam menjaga bumi ini.

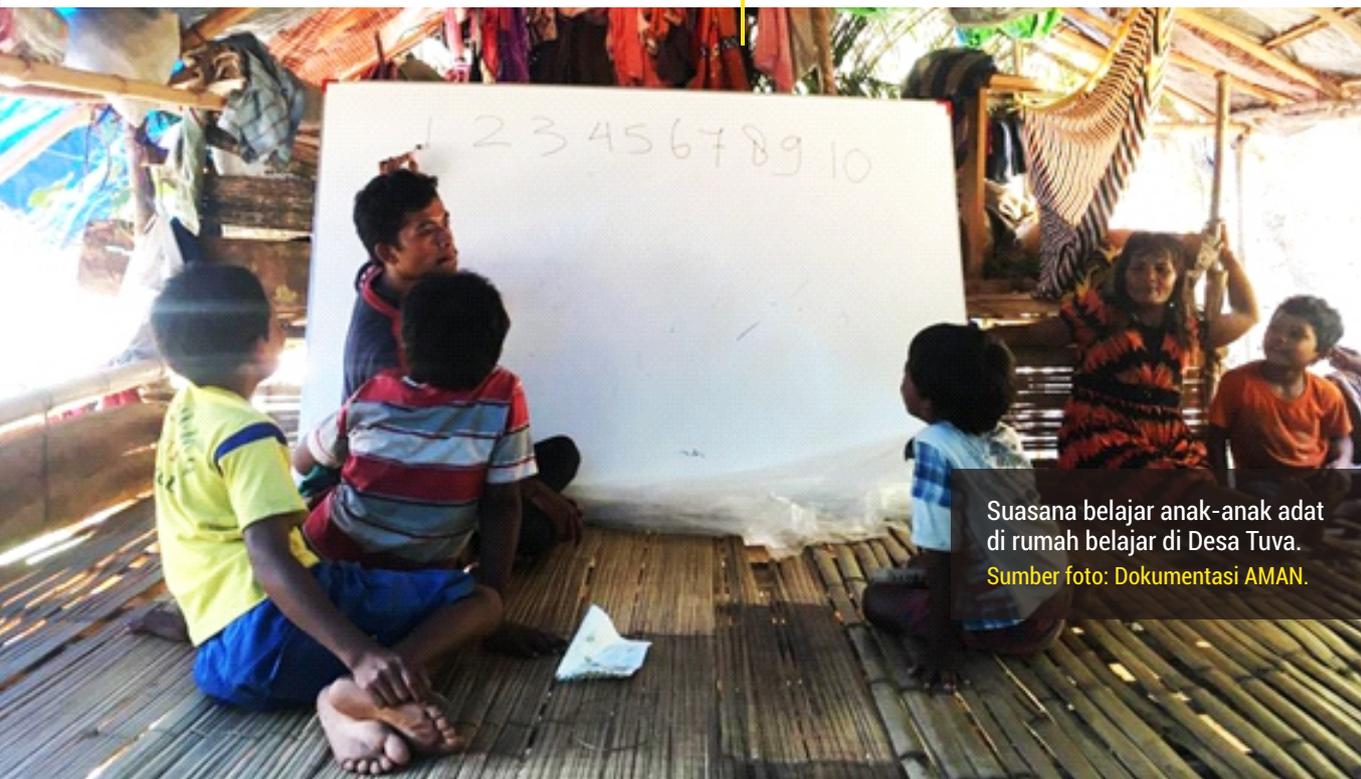
Mari, kita bersama memulai langkah dengan mendukung Masyarakat Adat untuk terus melestarikan budaya dan warisan leluhur!

Jadilah DerMA dengan berdonasi melalui:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Bank Mandiri KCP Pejaten, Jakarta

No. Rekening: 127-000-657-0905



Suasana belajar anak-anak adat di rumah belajar di Desa Tuva.

Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Ragam kabar terbaru seputar Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara, dapat diikuti lewat Portal Berita AMAN.or.id maupun Podcast Radio Gaung AMAN.



Nyaba Dulur dalam Vaksinasi Masyarakat Adat Baduy

Oleh Annas Radin Syarif *

"Masyarakat Adat memiliki hak yang sama untuk divaksinasi tanpa merusak kain sosial mereka," ucap Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin saat meninjau vaksinasi di Ciboleger, - gerbang Desa Kanekes yang menjadi tempat tinggal bagi Masyarakat Adat Baduy atau disebut juga dengan Urang Kanekes - Kabupaten Lebak, Banten pada November 2021 lalu. Saat itu, dari target seribu peserta vaksin, dua ratusnya diprioritaskan bagi Masyarakat Adat Baduy. Namun, jumlah Masyarakat Adat Baduy yang disuntik vaksin Covid-19 itu, hanya mencapai 20-an warga. Angka tersebut sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Desa Kanekes yang mencapai 11.667 jiwa (3.402 kepala keluarga) dan mendiami 68 kampung di wilayah adat seluas lebih dari lima ribu hektar yang sebagian besar berupa hutan.

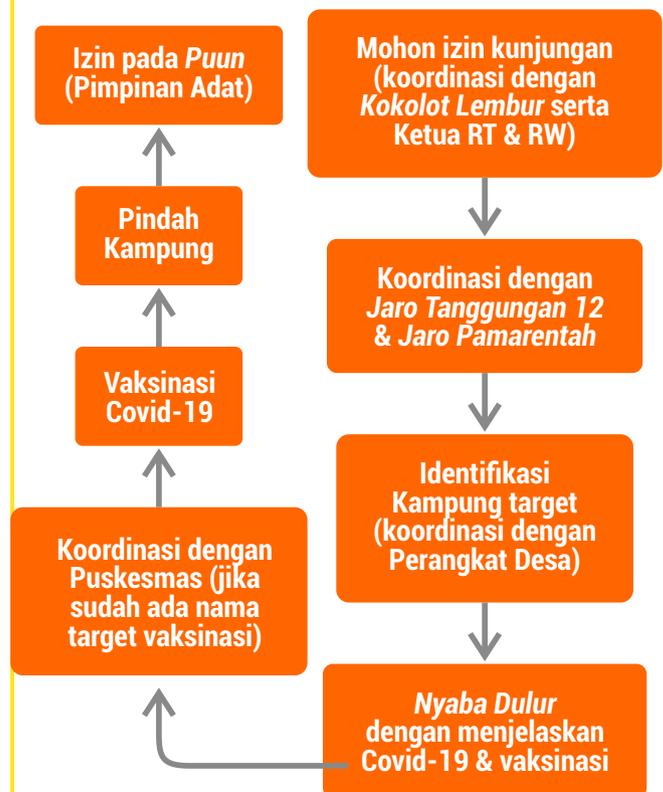
Secara geografis, lokasi ke-68 Kampung Baduy yang menyebar, menjadi tantangan dalam pelaksanaan vaksinasi. Berdasarkan pengalaman AMAN Banten Kidul, diperlukan dua sampai tiga jam berjalan kaki untuk menempuh perjalanan dari satu kampung ke kampung lain. Hal lain yang perlu diperhatikan, adalah aspek sosial-budaya Masyarakat Adat Baduy. Jika itu tidak diperhatikan dengan seksama, maka vaksinasi bisa berjalan tidak berjalan lancar, bahkan mendapat penolakan.

"Sebelumnya, sudah ada yang melakukan pendekatan dengan survei dan sosialisasi, namun warga menolak dengan berbagai alasan. Pihak Puskesmas Cisimeut beberapa kali melakukan vaksinasi keliling di Kampung Baduy Luar, namun hasilnya nihil," ungkap Henriana Hatra mewakili Pengurus Daerah AMAN Banten Kidul.

Melihat situasi tersebut, Tim AMANKanCovid19 di Banten Kidul pun menggunakan strategi yang berbeda, yaitu *nyaba dulur* yang dapat dimaknai sebagai semacam silaturahmi ke saudara. Pendekatan itu bertujuan untuk memahami situasi dan kondisi Masyarakat Adat Baduy sebelum vaksinasi.

Tim AMANKanCovid19 Banten Kidul yang terdiri dari 12 orang dari Masyarakat Adat Kasepuhan, - yang notabene mempunyai ikatan budaya kuat dengan Masyarakat Adat Baduy - melakukan pendekatan dengan para tetua atau tokoh adat dan juga melibatkan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Banten Kidul untuk menysasar kelompok pemuda adat dan perempuan adat.

Pada bagan berikut ini adalah proses *nyaba dulur* yang dilakukan oleh Tim AMANKanCovid19 setempat dalam mensosialisasi dan mendorong vaksinasi Masyarakat Adat Baduy.



Proses *nyaba dulur* dalam sosialisasi dan vaksinasi di Masyarakat Adat Baduy.

Sumber : Diolah dari informasi oleh Tim AMANKanCovid19 Banten Kidul

* Penulis adalah Ketua Tanggap Darurat AMAN.



Sebelum sosialisasi dilakukan, tim yang terdiri dari lima orang berangkat terlebih dahulu ke Kampung Cikeusik (salah satu Kampung Baduy Dalam) untuk meminta izin *Puun* atau pimpinan adat. Tim juga bertemu dengan *Jaro Tanggungan 12* dan *Jaro Tangtu* (perangkat dalam kelembagaan adat) untuk berkoordinasi mengenai survei dan sosialisasi yang akan dilakukan di Baduy Luar.

Setelah mendapatkan izin, tim melanjutkan koordinasi dengan perangkat desa untuk menentukan kampung yang menjadi target sosialisasi. Hasilnya, adalah tujuh kampung yang menjadi target utama, yaitu Kampung Gajeboh, Marengo, Balimbing, Kaduketug, Cisaban 1, Cisaban 2, dan Cisaban 3 (Leuwi Handam).

Kemudian, tim kembali lagi untuk memulai sosialisasi di Baduy Luar. Sehari sebelum keberangkatan, seluruh anggota tim melakukan *tes swab antigen*. Setelah dinyatakan negatif, barulah tim melakukan perjalanan untuk masuk ke dalam kampung dengan berjalan kaki. Di Kampung Kaduketug, tim pun bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan *Jaro Saija*.

Dari rumah *Jaro Saija*, tim melanjutkan jalan kaki ke Kampung Gajeboh selama sekitar dua jam. Rumah pertama yang dituju, yaitu rumah Bapak Ijom (Ketua RT). Di sana kami meminta izin bermalam dan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk survei dan sosialisasi tentang vaksinasi Covid-19 dengan pendekatan *nyaba dulur* seolah bersilaturahmi ke sanak saudara. Tim kemudian berhasil mengunjungi 90 warga dan mencatat nama-nama warga yang bisa dan mau divaksin.

Keesokan harinya, beberapa anggota tim menjemput tenaga kesehatan (vaksinator) di Puskesmas Cisimeut untuk pelaksanaan vaksinasi. Di Kampung Gajeboh, terdapat 22 warga yang berhasil divaksin saat itu.

Proses yang dilakukan Tim AMANKanCovid19 Banten Kidul di Kampung Gajeboh juga diterapkan di kampung lainnya. Kami pindah kampung dan kembali memulai proses *nyaba dulur* di setiap kampung dengan waktu yang pula disesuaikan dengan kondisi masing-masing Masyarakat Adat Baduy di tiap kampung. Pada siang hari, anggota tim kami bahkan ada yang ikut dengan warga untuk beraktivitas di ladang untuk bisa membangun rasa percaya dan peluang untuk memberikan informasi. Biasanya, sore atau malam, kegiatan vaksinasi bisa dilakukan.



Potret perkampungan Masyarakat Adat Baduy.
Sumber : Dokumentasi AMAN



Melakukan vaksinasi pada malam hari, menjadi tantangan bagi vaksinator, di mana tim harus bolak-balik ke kampung terdekat (berjalan kaki sekitar dua sampai tiga jam) demi mendapat es untuk penyimpanan vaksin. Sebab, tak ada listrik di sana. Tantangan lain adalah soal pemahaman warga yang telah dipengaruhi oleh peredaran hoaks (berita bohong). Maka, selain informasi dasar tentang Covid-19, tim membekali diri dengan pengetahuan seputar isu-isu yang menjadi perhatian khusus di kalangan Masyarakat Adat Baduy, termasuk hutan adat dan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Adat.

Administrasi kependudukan juga masih menjadi kendala karena sejumlah warga belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP. "Pernah ada warga yang menghindari dari petugas ketika ditanya soal KTP," Tutur Henriana Hatra.

Oleh karena itu, tim tidak menanyakan NIK atau KTP ke warga yang mau divaksin, melainkan mencatat identitas warga secara manual. Sementara itu, persoalan administrasi kependudukan itu diurus tim melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lebak dan Pemerintah Desa Kanekes.

Pada tujuh Kampung Baduy Luar, Tim AMANKanCovid19 Banten Kidul pun berhasil melakukan sosialisasi dan vaksinasi kepada 127 warga. Secara umum, kami mendapat respon yang baik dari berbagai pihak. Uding, seorang pemuda adat asal Kampung Leui Handam, mengaku senang dikunjungi. Selain mendapatkan pengetahuan, menurutnya, kegiatan tersebut menguatkan tali silaturahmi antara Masyarakat Adat Baduy dan Bayah. Para warga juga melontarkan rasa terima kasih atas wawasan dan vaksin yang telah diupayakan oleh tim.

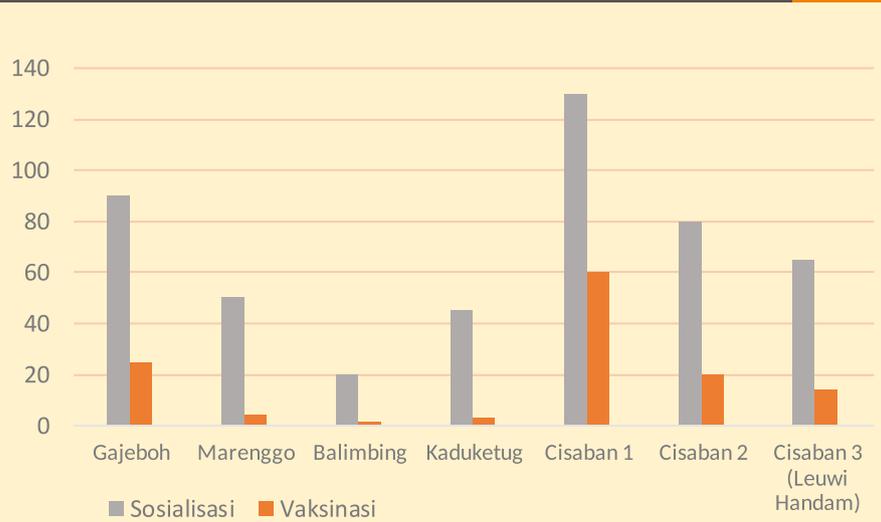
Dede, Kepala Puskesmas Cisimeut, merasa sangat terbantu dengan kehadiran kami dalam mempercepat capaian vaksinasi bagi Masyarakat Adat Baduy. Ia berharap Tim AMANKanCovid19 dapat terus membantu.

"Sebelumnya, capaian vaksinasi di Desa Kanekes baru mencapai 0,32 persen atau sekitar 22 warga," tuturnya. "Saat ini, terjadi peningkatan signifikan menjadi 4,03 persen, yaitu 278 warga dari target vaksin 6.890 warga. Ini membuktikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Tim AMANKanCovid19 Banten Kidul membuahkan hasil yang baik."

Hingga saat ini, kawan-kawan di AMAN Banten Kidul terus mendorong vaksinasi bagi Masyarakat Adat Baduy. Tentu, kerja-kerja itu bukanlah hal yang mudah, namun vaksinasi Covid-19 merupakan hak setiap warga dan perlu bersifat inklusif dengan mempertimbangkan pendekatan atau strategi khusus atas kebutuhan Masyarakat Adat terkait dengan kondisi geografis, aspek sosial-budaya, dan lain-lain.

Capaian sosialisasi dan vaksinasi Masyarakat Adat Baduy pada 21-28 Desember 2021.

Sumber : Diolah dari data Tim AMANKanCovid19 Banten Kidul.



Ikuti terus perkembangan mengenai kondisi Masyarakat Adat terkait Covid-19, vaksinasi bagi Masyarakat Adat, maupun kerja-kerja Satgas #AMANKanCovid19 melalui Portal Berita AMAN.or.id.



NUSANTARA INDIGENOUS COFFEE



NIC mempersembahkan kopi-kopi dari para petani adat Nusantara bagi kamu pecinta kafein. Petani-petani smallholder ini tersebar di NTT, Sulsel, Bali, dan Bengkulu, dan akan menyuntikkan semangat dalam secangkir kopi di pagi dan sore harimu.

Kami menyediakan full-washed Arabica dan Robusta green bean, roasted bean, maupun ground coffee yang sesuai dengan kesukaanmu. Kami juga bekerja sama dengan kakak kandung Gerai Nusantara dalam menyediakan goodie bag untuk kebutuhan event kamu dengan sistem PO dan harga terjangkau. Jangan ragu menghubungi kami untuk info tentang paket-paket yang kami punya.

Untuk berbelanja dengan nyaman, silakan kunjungi laman marketplace dan Instagram kami untuk lineup kopi-kopi yang tersedia. Atau, kontak kami untuk menikmati cerita-cerita kopi di kedai kami di Gerai Nusantara Bogor.

Dukung terus produk Masyarakat Adat Nusantara ya!

find us

Kedai: Jl. Jend. Sudirman No.15F, RT.01/RW.03, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (on appointment only)

 [indigenous_coffee](https://www.instagram.com/indigenous_coffee)

 085817808958 – Aji

 [indigenous_coffee](https://www.facebook.com/indigenous_coffee)

 [indigenouscoffee](https://www.tiktok.com/@indigenouscoffee)



Ketangguhan, Solidaritas, dan Kedaulatan Perempuan Adat

Ketika wilayah adat dirampas atau dirusak, sesungguhnya adalah kelompok perempuan adat yang akan lebih dulu mengalami dampak hebat dari itu. Apalagi, kita menyadari bagaimana sistem ekonomi dan politik maupun nilai atau norma yang patriarki dan feodal, telah menempatkan perempuan adat menjadi warga negara kelas dua yang seolah didudukkan di belakang lelaki. Tetapi, di sisi lain, seperti pernah diutarakan oleh Abdon Nababan, - kini menjabat sebagai Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) - "Perempuan adat adalah motor dimulainya gerakan di komunitas Masyarakat Adat." Segala kisah tentang perjuangan Masyarakat Adat, menurutnya, sesungguhnya dipelopori oleh perempuan adat.

Pada edisi ini, Majalah Gaung AMAN menghadirkan potret para perempuan adat dari berbagai penjuru Nusantara terkait dengan keseharian mereka dalam mengelola wilayah adat secara adil dan lestari. Selain menegaskan hak kolektif perempuan adat atas pengetahuan kolektif, wilayah kelola kolektif, dan otoritas diri, beragam potret ini juga menegaskan peran strategis perempuan adat yang menjadi sumber dan pengelola pemenuhan kebutuhan subsistensial bagi keluarga dan komunitas Masyarakat Adat. Dalam berbagai kegiatan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, kawan-kawan perempuan adat anggota PEREMPUAN AMAN, menunjukkan hasil dari kerja-kerja kolektif yang telah diupayakan selama ini.



Perempuan Adat Honitetu



Papua Barat

Pada foto di bawah ini, menampilkan seorang perempuan adat sedang memancing ikan dengan peralatan sederhana di laut sekitar di Pulau Meosmanggara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Selain melaut, para perempuan adat di Papua Barat pun memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganyam. Tidak hanya *noken*, - tas khas Masyarakat Adat Papua yang terbuat dari serat kayu - tapi perempuan adat asal Moi di Sorong juga pandai dalam membuat kerajinan dengan berbasis anyaman lain.





Kalimantan Tengah

Menganyam pula menjadi kekhasan pengetahuan dan keterampilan perempuan adat di Desa Haringen, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Berbagai anyaman yang umumnya terbuat dari rotan itu dapat dikreasikan menjadi aneka tas, tikar, dan perkakas rumah tangga atau benda dekoratif lainnya. Setiap motif pada anyaman dari Haringen, punya makna dan menandakan berbagai kisah yang melekatkan Masyarakat Adat pada leluhur dan wilayah adatnya.





Maluku

Di Maluku, selama pandemi Covid-19 ini, berbagai kelompok perempuan adat tengah sibuk beraktivitas di ladang. Para perempuan adat di sana telah mengembangkan kebun-kebun kolektif sayur-mayur yang sehari-hari dikonsumsi keluarga dan warga sekitar. Foto berikut ini adalah potret kegiatan para perempuan adat di Desa Uraur dan Honitetu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku.





Nusa Tenggara Timur

Di banyak tempat, para perempuan adat tak selalu berada pada kondisi baik-baik saja, di mana perempuan adat turut berjuang dalam mempertahankan wilayah adat dari perampasan. Salah satu yang sedang berjuang itu, adalah perempuan adat asal Rendu, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di sana, mama-mama melakukan aksi protes menentang lokasi pembangunan Waduk Lambo yang hendak menenggelamkan lokasi ritual, ladang penggembalaan, sumber air, makam leluhur, dan permukiman. Itu dilakukan dengan cara membangun "benteng" lewat aktivitas menenun.





Nusa Tenggara Barat

Di Montong Baan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, padi-padi menyelimuti banyak kawasan wilayah adat. Para perempuan adat umumnya banyak mengambil peran dalam proses pertanian dengan pengetahuan yang didapat secara turun-temurun, mulai dari proses pembenihan, penanaman, perawatan, hingga panen. Selama pandemi Covid-19, lumbung-lumbung warga tidak pernah kosong untuk menegaskan kecukupan dalam mempertahankan kedaulatan pangan.





Sumatera Utara

Para perempuan adat di Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagian memang telah bersuka cita atas pengembalian wilayah adat dari perampasan di masa lalu untuk perkebunan sawit. Tapi, wilayah adat itu tak lagi sama, di mana tanah yang tandus dan kering, memberikan situasi menantang untuk dapat diolah. Para perempuan adat pun bergerak. Tidak hanya untuk menyuburkan kembali tanah-tanah di kampung, melainkan pula menghijaukannya dengan bermacam jenis sayur, kacang-kacangan, jagung, dan pohon buah.





Gerai Nusantara: Rumah bagi Produk Seni dan Kerajinan Masyarakat Adat

Oleh Nurdiyansah Dalidjo



Masyarakat Adat kaya akan berbagai sumber daya. Alam yang lestari memberikan banyak manfaat dan inspirasi bagi para seniman dan pengrajin untuk menghasilkan produk-produk seni dan kerajinan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat. Melalui pengetahuan dan keterampilan kolektif yang dikembangkan secara turun-temurun, Masyarakat Adat mewarisi seni dan kerajinan dari leluhur untuk generasi mendatang. Itu mencakup kain tenun, anyaman, perkakas dapur, dan benda-benda dekoratif yang menghiasi rumah, upacara, dan perayaan adat lainnya. Produk-produk karya Masyarakat Adat bersifat dinamis dan terus berinovasi untuk bisa juga dinikmati kalangan umum guna mendukung perjuangan Masyarakat Adat dan keberlangsungan wilayah adat.

Mengenal Gerai Nusantara

Kali ini, Majalah Gaung AMAN berkunjung ke sebuah galeri sekaligus toko di Jl. Jend. Sudirman No. 15F, Kota Bogor untuk berbincang bersama Manajer Gerai Nusantara (GN) Rina Agustine tentang pengembangan produk-produk yang dikreasikan oleh Masyarakat Adat. Ia mengawalinya dengan berbagai cerita tentang awal mula didirikannya GN.

"Gerai Nusantara atau GN punya AMAN," kata Rina membuka obrolan. "Jadi, ia berdiri itu (sebagai perwujudan dari) cita-cita AMAN untuk menampilkan produk-produk Masyarakat Adat ke publik. Tahun 2014 terealisasi dan kita buat GN menjadi semacam 'ruang tamu' organisasi AMAN."

Bagi banyak komunitas Masyarakat Adat, produk-produk seni dan kerajinan memiliki makna lebih dari sekadar hal-hal yang estetik, melainkan pula jawaban atas tantangan kehidupan Masyarakat Adat saat ini, termasuk penyesuaian pada aspek sosial-ekonomi. Sejumlah produk berkembang dan punya arti baru terkait dengan fungsi dan daya guna. GN pun mengambil peran sebagai jembatan agar produk-produk itu memiliki nilai alternatif dan menemukan peminatnya.



Rina menjelaskan bahwa pada satu sisi, produk-produk tersebut turut menopang penghidupan Masyarakat Adat. Sementara di sisi lain, publik dapat menegaskan dukungan atas perjuangan gerakan Masyarakat Adat di Indonesia dengan membelinya. GN memadukan corak bisnis dan gerakan sosial yang mendukung perjuangan Masyarakat Adat.

"Sebenarnya kita bukan murni bisnis," ungkap Rina ketika mengutarakan lebih lanjut mengenai konsep dan cara kerja GN. "Ada aspek sosial dan lingkungan untuk membangun bisnis ini. Sekarang, orang bilang *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial). Kami di GN dimandatkan, selain berjualan, juga harus menceritakan bagaimana kondisi Masyarakat Adat di kampung." Rina menambahkan bahwa di balik produk-produk yang cantik itu, ada juga berbagai kisah dan persoalan seputar Masyarakat Adat yang perlu dikabari ke publik, khususnya masyarakat perkotaan.

Selain tenun dan anyaman, GN menyediakan berbagai produk inovatif dan siap pakai, seperti pakaian dan tas. Di sana, pengunjung dapat pula menikmati kopi-kopi dari beragam wilayah adat yang diproses secara arif dan lestari.

"Yang spesial itu, (produk-produk dihadirkan) langsung dari komunitas Masyarakat Adat. Ada organisasinya dan ada kelompoknya," kata Rina ketika menjawab pertanyaan mengenai keunggulan dari produk-produk GN. Sehingga, para pembeli dapat bertanya kepada staf GN mengenai asal-usul dan siapa yang membuatnya. Rina bilang bahwa setiap produk unik karena memiliki kisahnya sendiri. "Jadi, tidak asal beli. Kita bisa kasih informasi di balik tenun dan prosesnya. Ada yang menggunakan pewarna alam, teknik ikat, dan lainnya."

Manajer GN itu juga menjelaskan tentang bagaimana produk-produk bisa hadir di sana.



"Ada pembagian peran. Teman-teman di Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari di AMAN yang mencari kelompok tenun," ungkap Rina. "Kita tak ambil (barang dari) per orangan, tapi kelompok (karena) ini membawa (identitas) komunitas. Kalau per orangan, nanti yang kaya dia sendiri. Kita bukan hanya (hendak) menghasilkan uang, tapi filosofinya dan tenun itu jadi perjuangan teman-teman di komunitas Masyarakat Adat dalam berhadapan dengan konflik. Maka, kelompok (kolektivitas) itu sangat penting. Di Kajang, ada kelompok namanya Turikale, jadi terdapat pembagian peran dari sebuah kain, dari yang menenun, mewarnai kain, hingga memolesnya jadi mengkilat."

Bertahan dengan keunikan corak bisnis maupun produk semacam itu, tentu tidaklah mudah dengan mempertimbangkan betapa kompetitifnya usaha yang serupa di kawasan perkotaan. Kami pun berbincang tentang tantangan apa yang selama ini dihadapi terkait pendistribusian dan pengembangan.

"Tantangannya adalah kita harus cari yang beda," ungkap Rina. Di tengah-tengah perbincangan, ia mengajak saya untuk melihat-lihat ragam produk di ruang pameran. Pada rak-rak, terpajang berbagai tas. Helaian kain tenun terjuntai pada dinding. Tampaknya, siapa pun akan mudah terpicat dengan keindahan karya Masyarakat Adat. Rina lanjut menjelaskan, "Kita dapat informasi dan cerita langsung dari anggota AMAN. Jadi, untuk dapat cerita, tak bisa serta merta langsung dapat. Kadang, orang di kampung tak bisa bahasa Indonesia. Kadang, lewat telepon juga tak ada sinyal."

Namun, GN punya cara untuk mengatasi berbagai situasi menantang tersebut.



“Kan banyak tuh teman (dari) berbagai daerah yang datang (ke Kota Bogor maupun Jakarta), buru-buru kita tanya itu ke pengurus atau kader yang diundang. Kita datang untuk memastikan info selebar kain, misalnya. Kita minta mereka sekalian kirim produknya. Jadi, kita bisa langsung ngobrol. Masalah bahasa, kita dibantu teman pendamping untuk dapat cerita.”

Bertahan di Tengah Pandemi

Tetapi, tentu saja GN punya cerita lain ketika Covid-19 datang. Secara umum, pandemi telah menghantam berbagai sektor bisnis. Kebijakan terkait dengan pembatasan sosial dan penurunan daya beli, menjadi tantangan baru.

“Kami sempat kesulitan mendapatkan produk dari kampung karena beberapa kelompok usaha di tingkat komunitas, tidak menenun atau menganyam di awal pandemi,” jelas Rina. Selain adanya masalah di hulu, persoalan juga menanti di hilir. “Kami juga kesulitan memasarkan karena keterbatasan media pemasaran. Sebelumnya, penjualan terbesar biasanya melalui ajang pameran.”

GN pun mulai mengoptimalkan kanal belanja daring (*online*) untuk pemasaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet.

“Ini menjadi tantangan tersendiri karena masih banyak yang perlu dipelajari untuk menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh *platform* (kanal) *e-commerce* (perdagangan elektronik), seperti Tokopedia dan Instagram Shops.”

Di tengah pandemi, GN mengeluarkan produk yang kemudian banyak digemari, yaitu masker dari kain tenun.

“Kami merasa bahwa untuk menghasilkan sebuah masker tenun yang oke, perlu uji coba bertahap sampai mendapatkan kualitas masker yang nyaman dan tetap terlihat keren. Dan tentunya, memenuhi standar masker kain yang dianjurkan oleh instansi terkait,” ungkap Manajer GN itu. Menurutnya, penentuan bahan baku dan desain menjadi perhatian utama.

Kini, berbagai masker tenun maupun produk seni dan kerajinan lain karya Masyarakat Adat, bisa dipesan secara langsung di toko dan galeri GN di Kota Bogor dan Denpasar serta secara daring melalui Tokopedia atau Instagram. Dengan membeli produk-produk tersebut, kita tidak hanya akan mendapatkan kisah-kisah menarik tentang filosofi atau cerita di balik itu, melainkan juga menegaskan dukungan bagi perjuangan Masyarakat Adat di Indonesia.

Gerai Nusantara

Jl. Jend. Sudirman 15F,
Kota Bogor, Jawa Barat

Jl. Kusuma Dewa 2 No. 1,
Pemecutan Kaja, Denpasar, Bali

Telepon: +62 811 111 3237
Surel: gerainusantara14@gmail.com
Situs: www.gerainusantara.com
Instagram: [@gerainusantara_aman](https://www.instagram.com/gerainusantara_aman)





LAPORAN IURAN ANGGOTA ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA 01 Januari 2021 - 31 Desember 2021

Pendapatan Operasional	
Pendapatan Dana Iuran Anggota	19.899.600,00
Iuran Anggota	19.899.600,00
IURAN ANGGOTA KOMUNITAS	8.755.000,00
IURAN KADER PENGGERAK	360.000,00
SUMBANGAN	10.784.600,00
Total Pendapatan Operasional	19.899.600,00

TRANSPARANSI



LAPORAN KEUANGAN TANGGAP DARURAT/EMERGENCY RESPONSE (ER) ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019	504.184.783,76
Penerimaan	
20 April 2020 Tamalpais Trust Fund	764.770.500,00
4 Mei 2020 Pawanka Foundation	439.280.250,00
23 Juni 2020 Tebtebba	209.040.750,00
10 Juli 2020 AVAAZ Foundation	1.061.037.750,00
18 September 2020 RFN	712.892.376,00
27 Oktober 2020 IFAD	33.960.000,00
16 Desember 2020 Ashden Trust	101.953.500,00
24 Februari 2021 Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875,00
12 April 2021 CLUA	68.122.729,00
27 Juli 2021 SAMDHANA	43.500.000,00
13 Agustus 2021 Tamalpais Trust Fund	706.834.950,00
25 Agustus 2021 Ashden Trust	773.560.000,00
10 September 2021 CLUA	52.968.750,00
22 Oktober 2021 Pawanka Foundation	694.346.700,00
8 November 2021 Packard	5.659.759.450,00
Total Dana ER AMAN	11.834.929.363,76
Pengeluaran per 31 Desember 2021	5.312.643.187,06
Sisa dana menurut bank Per 31 Desember 2021	6.522.286.176,70

Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan-dukungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain



LAPORAN KEUANGAN
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
per 31 Desember 2021

Penerimaan Dana terikat Periode hingga Desember 2021	Jumlah
Tenure Facility	25.162.056.000,00
Ford Foundation	25.309.840.481,00
Tamalpais	5.729.882.875,00
CLUA	4.162.361.250,00
PACKARD	2.084.763.700,00
HIVOS	871.843.974,85
NIA TERO Foundation	2.919.318.900,00
Rainforest foundation US	252.148.700,00
IFAD	3.191.600.000,00
IWGIA	255.150.000
Pawanka-Wayfinder	709.332.600,00
NICFI	9.313.505.729,98
SKOLL	5.020.750.000,00
Saldo	84.982.554.210,83

Sisa Dana per 31 Desember 2021	Jumlah
Tenure Facility	-
Ford Foundation	-
Tamalpais	-
CLUA	1.587.022.629,78
PACKARD	-
HIVOS	-
NIA TERO Foundation	-
Rainforest foundation US	252.148.700,00
IFAD	2.201.347.124,12
IWGIA	240.166.250,00
Pawanka-Wayfinder	567.455.807,48
NICFI	9.313.505.729,98
SKOLL	5.020.750.000,00
Saldo	19.182.396.241,36

Penerimaan Dana tidak terikat	Jumlah
Dana iuran kader dan komunitas Anggota AMAN	113.894.601,00
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	37.361.338,00

Penerimaan Dana Emergency Respond	Jumlah
Ashden Trust (ER)	875.513.500,00
AVAAZ Foundation (ER)	1.061.037.750,00
Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376
Pawanka (ER)	694.346.700
Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750
Tamalpais Trust	1.471.605.450
Samdhana (ER)	43.500.000
Packard (ER)	5.659.759.450
Dana-dana Program ER	8.716.875
Sisa dana ER per 31 Desember 2021	6.522.286.176,70

Dana Organisasi per Desember 2021	Jumlah
Kas	15.000.000,00
Dana Organisasi	1.704.201.374,00
Dana Resiliency	3.406.234.181,68
Saldo	5.125.435.555,68

Titipan dana Program-program	863.070.269,00
-------------------------------------	-----------------------

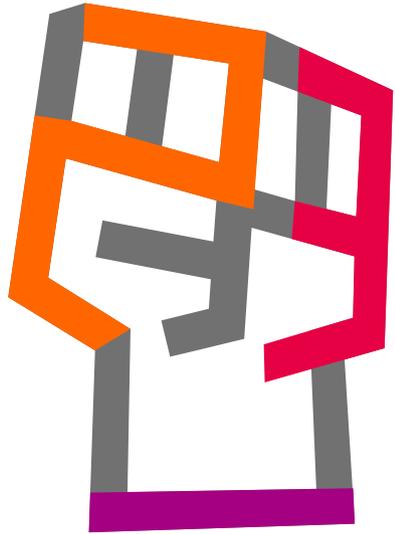
*Keluarga besar
Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara
(AMAN)
mengucapkan
selamat kepada:*



Nur Amalia S.H. & **Syamsul Alam Agus S.H.**
sebagai Ketua Dewan Pengawas sebagai Ketua Pelaksana

**Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
Periode 2021-2026**

Selamat Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara
(HKMAN) 2022 & 23 Tahun Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) | 17 Maret 2022



Tangguh di Tengah Krisis Perkuat Solidaritas Pulihkan Kedaulatan

